



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

# **ANALISIS PENGARUH INVESTASI, APBD DAN PENGANGGURAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI SUMATERA BARAT**

## **SKRIPSI**



**BUDI RAMDHANI**  
**05951055**

**JURUSAN ILMU EKONOMI**  
**FAKULTAS EKONOMI**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**PADANG**  
**2011**

*Dia memberikan hikmah (ilmu pengetahuan)  
Kepada Siapa yang dikehendaki-Nya  
Barang siapa yang mendapat hikmah itu,  
sesungguhnya ia telah mendapat kebijakan yang banyak  
dan tiadalah yang menerima peringatan  
melainkan orang-orang yang berbakat*

*(Al-Baqarah;269)*

*Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu,  
maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke Surga  
(Sabda Rasulullah, H'R Muslim)*

*Karya ini kupersembahkan untuk:  
Mama dan Papa yang tercinta  
Terima Kasih untuk semua Pengorbanan,  
Perhatian, kasih sayang dan doa yang selalu mengiringi*



**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Dengan ini dinyatakan bahwa:

Nama : **BUDI RAMDHANI**  
No. Bp : **05 951 055**  
Jenjang Pendidikan : **S 1 (Strata Satu)**  
Jurusan : **Ilmu Ekonomi**  
Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH INVESTASI, APBD DAN  
PENGANGGURAN TERHADAP PERTUMBUHAN  
EKONOMI DI SUMATERA BARAT**

Telah diuji dan disetujui skripsinya melalui ujian seminar hasil yang diadakan pada tanggal 4 mei 2011 sesuai dengan prosedur, ketentuan, dan kelaziman yang berlaku.

Padang, Juni 2011

Pembimbing



**Fery Andrianus, SE, M.Si**

**NIP. 132 230 524**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi



**Prof.Dr.H.Syafuruddin Karimi, MA**

**NIP.130 892 743**

**Prof.Dr.H.Firwan Tau,SE,M.E.Ec.DEA.Ing**

**NIP.130 812 952**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |               |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | No. Alumni Universitas | BUDI RAMDHANI | No. Alumni Fakultas |
| <b>BIODATA</b><br>a). Tempat/Tgl lahir : Padang, 10 Mei 1987    b). Nama Orang Tua : Syahril. M dan Mulyani    c). Fakultas : Ekonomi    d). Ilmu Ekonomi    e). No.Bp : 05 951 055    f). Tanggal Lulus : 4 Mei 2011    g). Predikat Lulus : Sangat Memuaskan    h). IPK : 2, 97    i). Lama Studi : 5 tahun 8 bulan    j). Alamat Orang Tua : Jl. Koto Kaciak |                        |               |                     |

**ANALISIS PENGARUH INVESTASI, APBD DAN PENGANGGURAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI SUMATERA BARAT SELAMA PERIODE 1990-2008**

Skripsi S1 Oleh : BUDI RAMDHANI      Pembimbing : Ferry Andrianus, SE,MSi

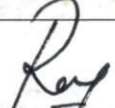
**ABSTRAK**

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh Investasi, APBD dan Pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat selama periode 1990 hingga 2008. Adapun alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dan di transformasikan dalam bentuk logaritma natural dengan menggunakan kuadrat terkecil (*Ordinary Least Square*). Uji statistik yang dilakukan adalah berupa koefisien Determinasi  $R^2$  (*Goodness Of Fit*), uji F, dan uji t. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan periode analisisnya dari tahun 1990-2008, dimana data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat.

Berdasarkan hasil pengujian empiris diperoleh bahwa variabel Investasi, APBD dan Pengangguran mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat sebesar 96,3 persen. Dimana Investasi dan APBD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Hasil penelitian ini sejalan dengan pandangan klasik yang menyatakan pertumbuhan ekonomi tergantung dengan tingkat investasi dan APBD (pengeluaran pemerintah), dimana semakin besar investasi dan APBD maka semakin besar pula pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Sedangkan pengangguran memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Hal ini bertolak belakang dengan teori klasik dimana pengangguran berhubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi. Dengan mengacu kepada teori penawaran tenaga kerja tak terbatas (berlimpah) oleh Lewis, dinyatakan bahwa tingginya atau meningkatnya jumlah penganggur (tenaga kerja yang mencari kerja) akan berdampak pada upah yang turun atau rendah. Hal ini dimanfaatkan oleh para kapitalis untuk menanamkan modalnya (investasi) guna mendapatkan laba lebih besar. Peningkatan investasi dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi.

*Keywords : Investasi, APBD, Pengangguran*

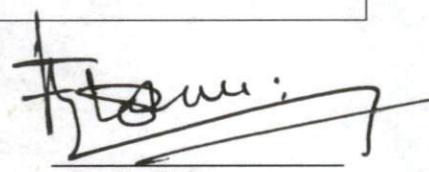
Skripsi ini telah dipertahankan dalam seminar skripsi dan dinyatakan lulus pada 4 Mei 2011, telah disetujui oleh pembimbing dan pembahas.

|              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tanda Tangan |  |  |  |
| Nama Terang  | <b>Ferry Andrianus, SE.MSi</b><br>(Pembimbing)                                      | <b>Dra. Leli Sumarni, MSi.,</b><br>(Pembahas I)                                     | <b>Febriandi Prima Putra, SE. MSi</b><br>(Pembahas II)                                |

Mengetahui :

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi :

**Prof.Dr.H. Firwan Tan, SE,M.Ec,DEA.Ing**  
NIP. 130 812 952

  
Tanda Tangan

Alumni telah mendaftar ke Fakultas Universitas Andalas dan mendapat alumnus :

|               |                                        |                |
|---------------|----------------------------------------|----------------|
|               | Petugas Fakultas / Universitas Andalas |                |
| Fakultas :    | Nama :                                 | Tanda Tangan : |
| Universitas : | Nama :                                 | Tanda Tangan : |



## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'Alaikum Wr.Wb.*

Segala puji dan syukur hanya bagi kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"ANALISIS PENGARUH INVESTASI, APBD DAN PENGANGGURAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI SUMATERA BARAT"** sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, serta shalawat dan salam penulis lafaskan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr.H.Syafruddin Karimi, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
2. Bapak Prof.Dr.H.Firwan Tan, SE, Mec, DEA.Ing selaku ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Andalas.
3. Ibu Neng Kamarni, SE. M.Si selaku Kepala Program Ekstensi Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Andalas dan pembimbing akademis.
4. Pembimbing, Bapak Fery Andrianus,SE,Msi yang telah memberikan arahan dan nasehat dalam penyelesaian skripsi ini.



5. Ibu Dra. Leli Sumarni, Msi dan Bapak Febriandi Prima Putra, SE. Msi selaku penguji dalam ujian seminar skripsi, yang telah memberikan masukan-masukan dan saran-saran demi penyempurnaan hasil skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu kepada penulis serta kepada staf Biro Akademik Jurusan Ilmu Ekonomi yang telah membantu penulis selama perkuliahan
7. Bapak Yon yang telah membantu kelancaran dalam administrasi, serta pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini belum sempurna dan banyak kekurangannya. Oleh karena itu dengan senang hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk lebih menyempurnakan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi pihak yang membacanya.

Padang, Juni 2011

Penulis



### ***Special Thanks To:***

- *Papa dan Mama, terima kasih buat segala pengorbanan, nasehat, kasih sayang serta doa yang selalu mengiringi langkah saya, tak akan bisa saya membalasnya, hanya Allah yang dapat membalas segalanya.*
- *Kakak saya Vivi dan adek saya Fani dan Sherfy yang memberikan motivasi dan dorongan agar saya dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini.*
- *Hanisa Eka Putri sebagai orang yang selalu ada disamping saya dan selalu saya cintai, yang memberikan segala kemampuannya untuk membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini, begitu banyak yang telah kamu berikan, terima kasih "Babe".*
- *Faski Yunanda yang memberikan pengaruh yang besar dalam skripsi ini dan beberapa sesajen yang telah saya berikan pada beliau.*
- *Bagi keluarga besar SIPAGA yang sudah saya anggap sebagai keluarga saya, Pakpek, Joe, Gery, Cukink Gaul, Alak, Romi, Langau, Kuah, Gagok, Nain, Yuni, Pangek, Anyoi, Marky, Ceper, Felong, Angin, Ipunk, Limbek dan seluruh Sipaga Family yang tidak disebutkan namanya, terima kasih Sipaga.*
- *Sahabat X10C Surya, Decri, Bayu, Emon, Kuah, Pak Je, Bopel, yang merupakan "Lakon Ekstensi"*
- *Seluruh keluarga besar Ekstensi ekonomi Universitas Andalas.*
- *Semua Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.*

# DAFTAR ISI

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

## ABSTRAK

## KATA PENGANTAR

i

## DAFTAR ISI

ii

## DAFTAR TABEL

vi

## DAFTAR GAMBAR

vii

## DAFTAR LAMPIRAN

viii

## BAB I PENDAHULUAN

|     |                            |   |
|-----|----------------------------|---|
| 1.1 | Latar Belakang.....        | 1 |
| 1.2 | Pernyataan Masalah.....    | 7 |
| 1.3 | Tujuan Penelitian.....     | 8 |
| 1.4 | Manfaat Penelitian.....    | 8 |
| 1.5 | Batasan Masalah.....       | 8 |
| 1.6 | Sistematika Penulisan..... | 9 |

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

|           |                                                         |    |
|-----------|---------------------------------------------------------|----|
| 2.1       | Tinjauan Teoritis.....                                  | 11 |
| 2.1.1     | Definisi Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Ekonomi... | 11 |
| 2.1.2     | Model pertumbuhan Ekonomi.....                          | 15 |
| 2.1.3     | Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....              | 17 |
| 2.1.4     | Investasi.....                                          | 19 |
| 2.1.4.1   | Jenis-jenis Investasi.....                              | 20 |
| 2.1.4.1.1 | Investasi Pemerintah ( <i>Public Investment</i> ).....  | 21 |
| 2.1.4.1.2 | Investasi Swasta ( <i>Private Investment</i> ).....     | 21 |
| 2.1.4.2   | Faktor-faktor yang mempengaruhi Investasi.....          | 22 |



|             |                                                                                                      |    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1.4.3     | Investasi dan GDP.....                                                                               | 25 |
| 2.1.4.4     | <i>Incremental Capital Output Ratio (ICOR)</i> .....                                                 | 26 |
| 2.1.5       | APBD.....                                                                                            | 28 |
| 2.1.5.1     | Pengertian Anggaran Daerah.....                                                                      | 28 |
| 2.1.5.2     | Penerimaan Daerah.....                                                                               | 30 |
| 2.1.5.2.1   | Pendapatan Asli Daerah.....                                                                          | 30 |
| 2.1.5.2.1.1 | Pajak Daerah.....                                                                                    | 31 |
| 2.1.5.2.1.2 | Retribusi Daerah.....                                                                                | 32 |
| 2.1.5.2.1.3 | Penerimaan Hasil Perusahaan<br>Milik Daerah dan Hasil<br>Pengelolaan Kekayaan Daerah<br>Lainnya..... | 33 |
| 2.1.5.2.1.4 | Lain-lain Pendapatan<br>Asli Daerah yang Sah.....                                                    | 35 |
| 2.1.5.2.2   | Dana Perimbangan Keuangan<br>Pemerintah Pusat dan Daerah .....                                       | 35 |
| 2.1.5.2.2.1 | Dana Bagi Hasil (DBH).....                                                                           | 36 |
| 2.1.5.2.2.2 | Dana Alokasi Umum (DAU)...                                                                           | 37 |
| 2.1.5.2.2.3 | Dana Alokasi Khusus (DAK)...                                                                         | 37 |
| 2.1.5.2.3   | Pinjaman Daerah.....                                                                                 | 38 |
| 2.1.5.2.3.1 | Sumber Pinjaman Daerah<br>dari Dalam Negeri.....                                                     | 39 |
| 2.1.5.2.4   | Lain-lain Penerimaan Daerah yang Sah...                                                              | 40 |
| 2.1.5.3     | Pengeluaran Pemerintah.....                                                                          | 40 |
| 2.1.5.3.1   | Pengertian Pengeluaran Pemerintah.....                                                               | 40 |
| 2.1.5.3.2   | Jenis-Jenis Pengeluaran Pemerintah.....                                                              | 42 |
| 2.1.5.3.2.1 | Pengeluaran Rutin.....                                                                               | 42 |
| 2.1.5.3.2.2 | Pengeluaran Pembangunan.....                                                                         | 43 |
| 2.1.5.4     | Teori Pengeluaran Pemerintah.....                                                                    | 43 |
| 2.1.5.4.1   | Model Pembangunan Tentang                                                                            |    |

|           |                                          |    |
|-----------|------------------------------------------|----|
|           | Teori Perkembangan Pengeluaran           |    |
|           | Pemerintah.....                          | 43 |
| 2.1.5.4.2 | Hukum Wagner.....                        | 44 |
| 2.1.5.4.3 | Teori Peacock dan Wiseman.....           | 45 |
| 2.1.5.4.4 | Teori Mikro.....                         | 46 |
| 2.1.6     | Pengangguran.....                        | 47 |
| 2.1.6.1   | Jenis-jenis Pengangguran .....           | 47 |
| 2.1.6.2   | Macam-macam Pengangguran Berdasarkan     |    |
|           | Penyebab Terjadinya.....                 | 48 |
| 2.1.6.3   | Sebab-sebab Terjadinya Pengangguran..... | 49 |
| 2.2       | Tinjauan Empiris.....                    | 50 |
| 2.3       | Hipotesis.....                           | 54 |

### BAB III METODE PENELITIAN

|       |                                                        |    |
|-------|--------------------------------------------------------|----|
| 3.1   | Jenis Penelitian.....                                  | 55 |
| 3.2   | Variabel Penelitian.....                               | 55 |
| 1.    | Variabel Bebas (Independent Variables).....            | 55 |
| 2.    | Variabel terikat/tergantung (Dependent Variables)..... | 57 |
| 3.3   | Metode Pengumpulan Data.....                           | 57 |
| 3.4   | Metode Analisis Data.....                              | 58 |
| 3.5   | Pengujian Hipotesis.....                               | 59 |
| 3.5.1 | Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....                   | 59 |
| 3.5.2 | Uji F-test.....                                        | 60 |
| 3.5.3 | Uji t-test.....                                        | 61 |
| 3.6   | Pengujian Asumsi Klasik.....                           | 61 |
| 3.6.1 | Uji Normalitas.....                                    | 61 |
| 3.6.2 | Uji Multikolinieritas.....                             | 62 |
| 3.6.3 | Uji heteroskedastisitas.....                           | 63 |
| 3.6.4 | Uji Autokorelasi.....                                  | 63 |



## **BAB IV GAMBARAN UMUM SUMATERA BARAT**

|       |                                                         |    |
|-------|---------------------------------------------------------|----|
| 4.1   | Letak Geografis.....                                    | 65 |
| 4.2   | Kondosi Topografi.....                                  | 67 |
| 4.2.1 | Morfologi Dataran.....                                  | 67 |
| 4.2.2 | Morfologi Bergelombang.....                             | 67 |
| 4.2.3 | Morfologi Perbukitan.....                               | 67 |
| 4.3   | Gambaran Ekonomi Sumatra Barat Tahun 2008.....          | 68 |
| 4.3.1 | Pertumbuhan Ekonomi.....                                | 68 |
| 4.3.2 | Struktur Ekonomi.....                                   | 72 |
| 4.4   | Gambaran Investasi Sumatra Barat.....                   | 75 |
| 4.5   | Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Sumatera Barat..... | 77 |
| 4.6   | Gambaran Pengangguran Sumatera Barat.....               | 79 |

## **BAB V PEMBAHASAN**

|     |                              |    |
|-----|------------------------------|----|
| 5.1 | Penemuan Empiris.....        | 82 |
| 5.2 | Pengujian Asumsi Klasik..... | 85 |
| A.  | Uji Normalitas.....          | 85 |
| B.  | Uji Multikolinearitas.....   | 85 |
| C.  | Uji Heteroskedastisitas..... | 86 |
| D.  | Uji Autokorelasi.....        | 87 |
| 5.3 | Implikasi Kebijakan.....     | 87 |

## **BAB VI PENUTUP**

|     |                 |    |
|-----|-----------------|----|
| 6.1 | Kesimpulan..... | 90 |
| 6.2 | Saran.....      | 91 |

## Daftar Tabel

|           |                                                                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tabel 4.1 | PDRB Sumatera Barat Atas Dasar Harga Konstan 2000                                         |
| Tabel 4.2 | Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat                                                        |
| Tabel 4.3 | Distribusi Persentase PDRB per sektor Sumatera Barat Atas Dasar Harga Berlaku (1990-2008) |
| Tabel 4.4 | Nilai Investasi Sumatera Barat 1990-2008                                                  |
| Tabel 4.5 | Belanja Daerah Sumatera Barat Tahun 1990-2008                                             |
| Tabel 4.6 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 1990-2008                                        |
| Tabel 5.1 | Hasil Regresi Linear Berganda                                                             |



## **Daftar Gambar**

- Gambar 2.1    Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah menurut Wagner
- Gambar 3.1    Kurva Durbin-Watson Autokorclasi
- Gambar 5.1    Uji Heteroskedastisitas

## **Daftar Lampiran**

- Lampiran 1. Data PDRB Sumatera Barat Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000
- Lampiran 2. Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat (%)
- Lampiran 3. Distribusi Persentase PDRB per sector Sumatera Barat Atas Dasar Harga Berlaku
- Lampiran 4. Nilai Investasi Sumatera Barat 1990-2008
- Lampiran 5. Belanja Daerah Sumatera Barat Tahun 1990-2008
- Lampiran 6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
- Lampiran 7. Hasil Regresi Linear Berganda
- Lampiran 8. Hasil SPSS untuk Uji Regresi Linear Berganda

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi adalah proses merubah struktur ekonomi yang belum berkembang dengan jalan *capital investment* dan *human investment* bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran penduduk atau *income per capita* naik (Hasibuan, 1987). Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita (Suparmoko, 2002). Jadi tujuan pembangunan ekonomi disamping untuk meningkatkan pendapatan nasional riil juga untuk meningkatkan produktivitas. Pembangunan ekonomi dapat memberikan kepada manusia kemampuan yang lebih besar untuk menguasai alam sekitarnya dan mempertinggi tingkat kebebasannya dalam mengadakan suatu tindakan tertentu. Pembangunan ekonomi ini mempunyai tiga sifat penting, yaitu :

- a. Suatu proses yang berarti merupakan perubahan yang terjadi terus-menerus.
- b. Suatu usaha untuk menaikkan pendapatan per jiwa/*income per capita*.
- c. Kenaikan *income per capita* itu harus terus-menerus dan pembangunan itu dilakukan sepanjang masa (Hasibuan, 1987).

Pemberlakuan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pelimpahan sebagian wewenang pemerintah daerah untuk mengatur dan



menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam rangka pembangunan nasional negara Republik Indonesia dan pemberlakuan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, diharapkan bisa memotifasi peningkatan kreatifitas dan inisiatif untuk lebih menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh tiap-tiap daerah, dan dilaksanakan secara terpadu, serasi, dan terarah agar pembangunan di setiap daerah dapat benar-benar sesuai dengan prioritas dan potensi daerah.

Kegiatan pembangunan nasional tidak lepas dari peran seluruh Pemerintah Daerah yang telah berhasil memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia di daerah masing-masing. Sebagai upaya memperbesar peran dan kemampuan daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangga. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, pemerintah daerah tingkat satu memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia di daerah itu dan dituntut untuk bisa lebih mandiri. Terlebih dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka pemerintah daerah tingkat satu harus bisa mengoptimalkan pemberdayaan semua potensi yang dimiliki dan perlu diingat bahwa pemerintah daerah tingkat satu tidak boleh terlalu mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi adalah sebagian dari perkembangan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan besarnya pertumbuhan domestik regional bruto perkapita (PDRB perkapita) (Zaris, 1987). Tingginya

tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan tingginya nilai PDRB menunjukkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian. Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolok ukur secara makro adalah pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, meskipun telah digunakan sebagai indikator pembangunan, pertumbuhan ekonomi masih bersifat umum dan belum mencerminkan kemampuan masyarakat secara individual. Pembangunan daerah diharapkan akan membawa dampak positif pula terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dicerminkan dari perubahan PDRB dalam suatu wilayah. Sumatera Barat yang dikategorikan memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah ternyata memiliki sumber daya alam yang cukup banyak. Laju pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat selama kurun waktu lima tahun terakhir ini selalu mengalami kenaikan, walaupun kenaikan itu tidak terlalu signifikan.

Kenaikan PDRB di Sumatera Barat baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan tahun 2000 selama periode 1990-2008 rata-rata mengalami kenaikan. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat selalu mengalami kenaikan. Dari data badan pusat statistik Sumatera Barat, kenaikan yang sangat signifikan terjadi dalam 2 tahun terakhir. Pada tahun 2007 PDRB Sumatera Barat atas dasar harga konstan tahun 2000 sebesar 32,912,968.59 (dalam juta rupiah) naik menjadi 35,007,921.57 (dalam juta rupiah) pada tahun 2008.

Pertumbuhan ekonomi merupakan fungsi dari investasi yang berarti tergantung dari jumlah modal dan teknologi yang ditanam dan dikembangkan dalam masyarakat. Investasi merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan tingkat pendapatan nasional. Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan taraf kemakmuran (Sukirno,1994).

Iklim investasi yang sehat dan kompetitif juga diharapkan akan memacu perkembangan investasi yang saling menguntungkan dalam pembangunan daerah, dimana nilai investasi di Sumatera Barat sangat fluktuatif.

Modal pembangunan yang penting selain keuangan daerah dan investasi adalah sumber daya manusia. Partisipasi aktif dari seluruh masyarakat akan mempercepat pembangunan daerah karena rasa kepemilikan yang lebih besar terhadap daerah. Hasil yang dicapai dalam pembangunan juga akan lebih cepat dirasakan untuk daerah sendiri sehingga nantinya dapat merangsang kesadaran masyarakat membangun wilayah lokal masing-masing.

Selain itu APBD juga merupakan faktor penunjang pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan kebijaksanaan keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta berbagai pertimbangan lainnya dengan maksud agar penyusunan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mudah



dilakukan. Pada sisi yang lain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat pula menjadi sarana bagi pihak tertentu untuk melihat atau mengetahui kemampuan daerah baik dari sisi pendapatan maupun sisi belanja (Kuncoro, 2004).

APBD terdiri dari Penerimaan dan Belanja Daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah yaitu pendapatan asli daerah, dana berimbang, dan penerimaan lain-lain yang sah. Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam daerah yang bersangkutan yg terdiri dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah atau sumber daya alam dan lain-lain pendapatan yang sah. Dana berimbang merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari bagian daerah pajak bumi dan bangunan (PBB), Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, penerimaan Sumber Daya Alam serta Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Belanja daerah adalah belanja yang tertuang dalam APBD yang diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Secara umum belanja daerah dapat dikategorikan ke dalam pengeluaran rutin dan pengeluaran pemerintah. Pengeluaran rutin merupakan belanja yang penggunaannya untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah daerah. Pengeluaran pembangunan merupakan belanja yang penggunaannya diarahkan dan dinikmati langsung oleh masyarakat.

APBD merupakan sebuah instrumen kebijakan yang sangat penting artinya bagi banyak pihak. APBD sangat penting bagi Pemerintah Daerah karena menyangkut sumber dana operasional Pemerintah Daerah. APBD sangat penting bagi pembangunan karena mengatur prioritas dan alokasi dana pembangunan di daerah. APBD sangat penting bagi rakyat karena di dalamnya juga nasib rakyat bergantung.

Pengangguran juga merupakan salah satu masalah ekonomi makro di seluruh Negara, khususnya Negara sedang berkembang, tidak terkecuali Indonesia. Pengangguran juga termasuk masalah dalam bidang ketenagakerjaan dimana penganggur merupakan bagian dari angkatan kerja tidak bekerja.

Salah satu prioritas dalam membangun perekonomian yang dikemukakan pemerintah Indonesia adalah penciptaan lapangan pekerjaan atau berkurangnya tingkat pengangguran. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang besar berpotensi tinggi dalam menghasilkan output nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Jumlah pengangguran di Sumbar kondisi terakhir tercatat sebanyak 173.080 orang atau 7,97 persen dari total angkatan kerja. Angka ini berdasarkan survei Biro Pusat Statistik (BPS) Sumbar per Agustus 2009. Namun ketimbang tahun lalu, secara persentase mengalami penurunan. Buktinya, jumlah penduduk bekerja naik sebesar 2,18 persen dari 1.956.378 orang menjadi 1.998.922 orang. Sedangkan jumlah angkatan kerja naik 2,05

persen dari 2.127.512 orang pada Agustus 2008 menjadi 2.172.002 orang pada Agustus 2009.

Dari data tersebut terlihat, keberhasilan Pemprov Sumbar menekan angka pengangguran terbuka, karena peningkatan jumlah penduduk bekerja lebih banyak dari peningkatan jumlah angkatan kerja. Tapi di sisi lain, perlu dituntut untuk memperluas kesempatan kerja, baik dalam maupun luar negeri sehingga persentase pengangguran semakin kecil.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa investasi, APBD dan pengangguran mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Dari fenomena tersebut di atas maka perlu adanya suatu penelitian yang diharapkan dapat memberikan rekomendasi demi kelangsungan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Hal ini yang melatarbelakangi penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Investasi, APBD dan Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat”**.

## 1.2 Perumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang diatas dapat dikemukakan masalah yang ingin disampaikan yaitu :

1. Bagaimana pengaruh Investasi, APBD dan Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat?
2. Variabel manakah yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat.



### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis apakah Investasi, APBD dan Pengangguran berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat.
2. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh masing-masing variabel yaitu Investasi, APBD dan Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana kontribusi Investasi, APBD dan Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat.
2. Penelitian ini diharapkan sebagai informasi bagi lembaga-lembaga terkait dalam menentukan kebijaksanaannya yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi daerah.

### **1.5 Batasan Masalah**

Penelitian ini memfokuskan pada analisis Investasi, APBD dan Pengangguran di Sumatera Barat pada periode waktu tahun 1990-2008.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini membahas beberapa unsur yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis dan sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas tentang landasan teori penelitian dan tinjauan literatur dari penelitian terdahulu.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang: pertama, objek penelitian, kedua metode pengumpulan data, ketiga metode analisis data dan yang keempat definisi operasional variabel.

### **BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN**

Bab ini membahas tentang kondisi geografis provinsi Sumatera Barat, gambaran perkembangan PDRB provinsi Sumatera Barat, investasi, APBD dan Pengangguran Sumatera Barat.

### **BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan tentang hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

## BAB VI PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang membahas tentang kesimpulan dari penelitian dan saran yang diberikan mengenai penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Teoritis**

##### **2.1.1 Definisi Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno, 1994). Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP (*Gross Domestic Product*) tanpa memandang bahwa kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk dan tanpa memandang apakah ada perubahan dalam struktur ekonominya (Suryana, 2000). Pertumbuhan ekonomi adalah sebagian dari perkembangan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan besarnya pertumbuhan domestik regional bruto per kapita (PDRB per kapita) (Zaris, 1987). Pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya perluasan atau peningkatan dari *Gross Domestic Product* potensial/output dari suatu Negara (Samuelson, 1995). Ada 4 faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi :

a. Sumber daya manusia.

Kualitas input tenaga kerja, atau sumber daya manusia merupakan faktor terpenting bagi keberhasilan ekonomi. Hampir semua faktor produksi yang lainnya, yakni barang modal, bahan mentah serta teknologi,

bisa dibeli atau dipinjam dari negara lain. Tetapi penerapan teknik-teknik produktivitas tinggi atas kondisi-kondisi lokal hampir selalu menuntut tersedianya manajemen, keterampilan produksi, dan keahlian yang hanya bisa diperoleh melalui angkatan kerja terampil yang terdidik.

b. Sumber daya alam.

Faktor produksi kedua adalah tanah. Tanah yang dapat ditanami merupakan faktor yang paling berharga. Selain tanah, sumber daya alam yang penting antara lain minyak-minyak gas, hutan air dan bahan-bahan mineral lainnya.

c. Pembentukan modal.

Untuk pembentukan modal, diperlukan pengorbanan berupa pengurangan konsumsi, yang mungkin berlangsung selama beberapa puluh tahun. Pembentukan modal dan investasi ini sebenarnya sangat dibutuhkan untuk kemajuan cepat di bidang ekonomi.

d. Perubahan teknologi dan inovasi

Salah satu tugas kunci pembangunan ekonomi adalah memacu semangat kewiraswastaan. Perokonomian akan sulit untuk maju apabila tidak memiliki para wiraswastawan yang bersedia menanggung resiko usaha dengan mendirikan berbagai pabrik atau fasilitas produksi, menerapkan teknologi baru, menghadapi berbagai hambatan usaha, hingga mengimpor berbagai cara dan teknik usaha yang lebih maju (Samuelson, 1995).

Pertumbuhan ekonomi menerangkan atau mengukur prestasi dari perkembangan dari suatu perekonomian, sedangkan dalam analisis makro ekonomi tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai suatu Negara (Sukirno, 1994). Menurut Boediono, pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses dari kenaikan output perkapita dalam jangka waktu yang panjang (Boediono, 1998). Pertumbuhan ekonomi disini meliputi 3 aspek yaitu :

- a. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses (aspek ekonomis) suatu perekonomian berkembang, berubah dari waktu ke waktu.
- b. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan adanya kenaikan output perkapita, dalam hal ini ada 2 aspek penting yaitu output total dan jumlah penduduk. Output perkapita adalah output total dibagi jumlah penduduk.
- c. Pertumbuhan ekonomi dikaitkan dengan perspektif waktu jangka panjang. Dikatakan tumbuh bila dalam jangka panjang waktu yang cukup lama (5 tahun) mengalami kenaikan output.

Para ahli ekonomi menyatakan bahwa istilah pertumbuhan ekonomi berbeda dengan istilah pembangunan ekonomi. Menurut Suryana, menerangkan bahwa pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang (Suryana, 2000). Dari definisi ini mengandung tiga unsur yaitu :

- a. Pembangunan ekonomi sebagai suatu proses berarti perubahan yang terus-menerus yang didalamnya telah mengandung unsur-unsur kekuatan sendiri untuk investasi baru.
- b. Usaha meningkatkan pendapatan perkapita.
- c. Kenaikan pendapatan perkapita harus berlangsung dalam jangka panjang.

Sumitro Djojohadikusumo, pembangunan ekonomi mengandung arti yang lebih luas serta mencakup perubahan pada susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh (Sanusi, 2004). Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Dari definisi tersebut jelas bahwa pembangunan ekonomi mempunyai pengertian :

- a. Suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus-menerus.
- b. Usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita.
- c. Kenaikan pendapatan perkapita harus terus berlangsung dalam jangka panjang.
- d. Perbaikan sistem kelembagaan disegala bidang (misalnya ekonomi, politik, hukum, sosial dan budaya). Sistem ini bisa di tinjau dari dua aspek yaitu : aspek perbaikan di bidang organisasi (institusi) dan perbaikan di bidang regulasi (baik legal formal maupun informal) (Arsyad, 1999).



### 2.1.2 Model pertumbuhan ekonomi

Pembangunan daerah dan pembangunan sektoral perlu selalu dilaksanakan dengan selaras, sehingga pembangunan sektoral yang berlangsung di daerah-daerah, benar-benar sesuai dengan potensi dan prioritas daerah. Dan keseluruhan pembangunan daerah juga benar-benar merupakan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan di dalam mewujudkan tujuan nasional. Pembangunan daerah dilaksanakan agar ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar daerah tidak semakin meluas. Tujuan pembangunan yang sedang dilaksanakan mencakup sasaran seperti : *Pertama*, dalam usaha meratakan pembangunan di seluruh daerah, sekaligus untuk menghindari terjadinya jurang perbedaan tingkat pembangunan antar daerah yang semakin dalam. *Kedua*, pengarahan dalam kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan kemampuan aspirasi dan potensi yang terdapat di daerah, baik bagi kepentingan perkembangan nasional maupun bagi kepentingan daerah sendiri. *Ketiga*, mengembangkan hubungan ekonomi antar daerah yang saling menguntungkan agar terjalin ikatan-ikatan (ekonomi) antar daerah yang kuat di dalam satu rangka kesatuan ekonomi nasional yang kokoh. *Keempat*, membina daerah-daerah minus, daerah perbatasan, dan tanah-tanah kritis, dengan program-program khusus (Sanusi, 1987).

Pembangunan daerah juga diarahkan untuk mencapai tiga tujuan penting yaitu mencapai pertumbuhan (*growth*), pemerataan (*equity*), dan keberlanjutan (*sustainability*). Tujuan pembangunan yang pertama, untuk

pertumbuhan ditentukan sampai dimana kelangkaan sumber daya yang terdiri atas sumber daya manusia (*human capital*), peralatan (*man made resources*) dan sumber daya alam (*natural resources*) dapat dialokasikan secara maksimal dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kegiatan produktif. Dalam hal ini terdapat upaya memadukan kemampuan sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya alam dengan ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan teknologi dalam rangka memperbesar produktifitas. Semakin tinggi tingkat kemampuan sumber daya manusia, besar kemungkinan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia guna mencapai pertumbuhan yang tinggi. Sedangkan tujuan pembangunan yang kedua, yaitu pemerataan yang mempunyai implikasi dalam pencapaian tujuan yang ketiga supaya sumber daya dapat berkelanjutan maka tidak boleh terfokus hanya pada satu daerah saja sehingga manfaat yang diperoleh dari pertumbuhan dapat dinikmati semua pihak. Sedangkan tujuan berkelanjutan, pembangunan daerah harus memenuhi persyaratan bahwa penggunaan sumber daya, baik yang ditransaksikan melalui sistem pasar maupun diluar sistem pasar harus tidak melampaui kapasitas kemampuan produksi.

Pada hakekatnya pertumbuhan suatu daerah dapat terjadi sebagai akibat dari penentu-penentu endogen maupun eksogen, yakni faktor-faktor yang terdapat di dalam daerah yang bersangkutan ataupun faktor-faktor di luar daerah atau kombinasi keduanya. Suatu pendekatan yang lazim digunakan untuk menjelaskan penentuan-penentuan internasional dari pertumbuhan regional adalah melalui penggunaan model-model ekonomi

makro. Model-model ini berorientasi pada segi penawaran dan berusaha menjelaskan output menurut faktor-faktor regional tertentu yang masing-masing dapat dianalisa secara sendiri-sendiri.  $Q_n : f_n (K, L, LN, Tr, T, So)$

Dimana :

$Q_n$  : Output dari daerah lain

$K$  : Kapital

$L$  : Labour

$Ln$  : Land (tanah)

$Tr$  : Transportasi

$T$  : Teknologi

$So$  : Sosial politik

Kalau dirumuskan menurut faktor-faktor yang lebih penting dan lebih mudah dikuantitaskan, maka rumus persamaan yang mencerminkan hubungan input output adalah menggunakan fungsi produksi Cobb Douglas.

### **2.1.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

PDRB merupakan penjumlahan dari semua harga dan jasa akhir atau semua nilai tambah yang dihasilkan oleh daerah dalam periode waktu tertentu (1 tahun). Untuk menghitung nilai seluruh produksi yang dihasilkan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu dapat digunakan 3 cara penghitungan. Ketiga cara tersebut adalah :

a. Cara Pengeluaran.

Dengan cara ini pendapatan nasional dihitung dengan menjumlah pengeluaran atas barang-barang dan jasa yang diproduksi dalam negara tersebut. Menurut cara ini pendapatan nasional adalah jumlah nilai pengeluaran rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi dan pengeluaran pemerintah serta pendapatan ekspor dikurangi dengan pengeluaran untuk barang-barang impor.

b. Cara Produksi atau cara produk netto.

Dengan cara ini pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai produksi barang atau jasa yang diwujudkan oleh berbagai sektor (lapangan usaha) dalam perekonomian. Dalam menghitung pendapatan nasional dengan cara produksi yang dijumlahkan hanyalah nilai produksi tambahan atau *value added* yang diciptakan.

c. Cara Pendapatan.

Dalam penghitungan ini pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk mewujudkan pendapatan nasional. (Sukirno, 1994).

Adapun manfaat penghitungan nilai PDRB adalah :

- Mengetahui dan menelaah struktur atau susunan perekonomian.
- Dari perhitungan PDRB dapat diketahui apakah suatu daerah termasuk daerah industri, pertanian atau jasa dan berapakah besar sumbangan masing-masing sektornya.



- Membandingkan perekonomian dari waktu ke waktu. Oleh karena nilai PDRB dicatat tiap tahun, maka akan di dapat catatan angka dari tahun ke tahun. Dengan demikian diharapkan dapat diperoleh keterangan kenaikan atau penurunan apakah ada perubahan atau pengurangan kemakmuran material atau tidak.

#### **2.1.4 Investasi**

Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian (Sukirno, 1994). Investasi tidak hanya untuk memaksimalkan output, tetapi untuk menentukan distribusi tenaga kerja dan distribusi pendapatan, pertumbuhan dan kualitas penduduk serta teknologi.

Investasi swasta di Indonesia dijamin keberadaannya sejak dikeluarkannya Undang-undang No. 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing dan Undang-undang No. 6 tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri, yang kemudian dilengkapi dan disempurnakan dengan Undang-undang No. 11 tahun 1970 tentang penanaman modal asing dan Undang-undang No. 12 tahun 1970 tentang penanaman modal dalam negeri. Berdasarkan dari sumber kepemilikan modal, maka investasi swasta dapat di bagi menjadi penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Investasi atau pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang modal dan

peralatan-peralatan produksi dengan tujuan mengganti dan untuk menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan. Investasi atau pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan produksi dibedakan menjadi investasi perusahaan swasta, perubahan inventaris perusahaan dan investasi yang dilakukan oleh pemerintah. Investasi perusahaan merupakan komponen yang terbesar dari investasi dalam suatu negara.

Pengeluaran investasi tersebut terutama meliputi mendirikan bangunan industri, membeli mesin-mesin dan peralatan produksi lain dan pengeluaran untuk menyediakan bahan mentah. Investasi yang dilakukan di masa kini sangat erat hubungannya dengan prospek memperoleh keuntungan di masa depan.

Harolld dan Dommar memberikan peranan kunci kepada investasi terhadap peranannya dalam proses pertumbuhan ekonomi khususnya mengenai watak ganda yang dimiliki investasi. Pertama, investasi memiliki peran ganda dimana dapat menciptakan pendapatan, dan kedua, investasi memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal (Jhingan, 1983).

#### **2.1.4.1 Jenis - Jenis Investasi**

Secara umum investasi menurut sumbernya dibagi atas dua :

##### **2.1.4.1.1 Investasi Pemerintah (*Public Investment*)**

Investasi pemerintah adalah pembelian, penambahan dan pembentukan barang modal serta perubahan stok oleh pemerintah yang menyelenggarakan administrasi umum. Investasi pemerintah juga dapat diartikan sebagai investasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk pengeluaran pembangunan dengan tujuan mengutamakan kepentingan umum (Makmum, 2003).

Investasi pemerintah sangat dibutuhkan dalam percepatan pembangunan terutama dibidang penyediaan publik yang tidak mungkin disupply oleh pihak swasta. Investasi pemerintah diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

##### **2.1.4.1.2 Investasi Swasta (*Private Investment*)**

Investasi swasta adalah investasi secara murni yang meliputi pembelian, penambahan dan pembentukan barang modal dan perubahan stok oleh pihak swasta. Investasi ini bisa dilakukan oleh pihak swasta dalam negeri (PMDN) dan pihak swasta asing (PMA). Data investasi swasta diperoleh dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) (Heliana, 2010).

PMDN merupakan investasi yang dilakukan oleh swasta dan badan usaha Negara yang mendapat kemudahan dan fasilitas dari pemerintah baik dalam proses perizinan dan kemudahan lainnya yang modalnya berasal dari

dalam negeri. Sedangkan PMA adalah investasi yang dilakukan oleh pihak swasta yang modalnya bersumber dari investor asing dengan mendapat kemudahan dan fasilitas dari pemerintah. (Badan Koordinasi Penanaman Modal)

Investasi yang dilakukan pemerintah berbeda dengan investasi yang dilakukan swasta, dimana investasi swasta didasarkan pada keuntungan. Sedangkan investasi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### **2.1.4.2 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Investasi**

Pendapatan nasional bisa naik atau turun karena perubahan investasi. Kondisi ini tergantung pada perubahan teknologi, penurunan tingkat bunga, pertumbuhan penduduk, dan faktor-faktor dinamis lainnya (Makmum, 2003).

Salah satu unsur penggerak pertumbuhan ekonomi yang belum pulih adalah investasi. Upaya untuk menarik investasi dihadapkan pada dua lingkungan strategis yaitu lingkungan eksternal yang semakin ketat dan daya tarik domestik yang masih lemah. Sementara itu lingkungan domestik masih belum mampu menciptakan iklim investasi yang sehat. Beberapa faktor domestik yang menghambat iklim investasi belum mengalami perbaikan yang berarti. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah sebagai berikut (Sitompul, 2007):

1. Prosedur yang panjang dan berbelit. Sebagai contoh untuk memulai usaha di bidang perdagangan diperlukan tidak kurang dari 46 surat izin dari



berbagai tingkat pemerintahan. Berdasarkan telaah Bank Dunia (2003) terhadap peraturan perundangan yang ada, dibutuhkan sekitar 11 prosedur pokok untuk memulai usaha di Indonesia yang memakan waktu 168 hari atau hamper tiga kali lipat dibandingkan dengan rata-rata Negara Asia Timur lainnya yaitu sekitar 66 hari. Prosedur yang panjang dan berbelit tidak hanya mengakibatkan ekonomi biaya tinggi tetapi juga menghilangkan peluang usaha yang seharusnya dapat dimanfaatkan baik untuk kepentingan perusahaan maupun untuk kepentingan nasional seperti dalam bentuk penciptaan lapangan kerja.

2. Tumpang tindihnya kebijakan pusat dan daerah di bidang investasi serta kebijakan antar sector. Belum mantapnya pelaksanaan program desentralisasi mengakibatkan kesimpangsiuran kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam kebijakan investasi. Disamping itu juga terdapat keragaman yang besar dari kebijakan investasi antar daerah. Semuanya ini mengakibatkan ketidakjelasan kebijakan investasi nasional yang pada gilirannya akan menurunkan minat investasi.
3. Kurangnya kepastian hukum dengan berlarutnya perumusan RUU Penanaman Modal dan lemahnya penegakan hukum yang terkait dengan kinerja pengadilan niaga.
4. Kurang kondusifnya pasar tenaga kerja. Menurunnya penciptaan lapangan kerja per satuan pertumbuhan ekonomi mengindikasikan keengganan perusahaan untuk memanfaatkan tenaga kerja. Secara singkat terdapat dua masalah ketenagakerjaan yang mempengaruhi minat investasi yaitu: (a)

kecendrungan peningkatan upah minimum yang tinggi dan besarnya biaya-biaya non-UMP serta (b) ketidakpastian hubungan industrial antara perusahaan dan tenaga kerja tidak saja tinggi, tetapi juga sulit untuk diperkirakan.

5. Meskipun sejak tahun 2001 stabilitas keamanan secara nasional relative membaik, kegiatan investasi di Indonesia masih sangat sensitif terhadap gangguan keamanan di daerah sehingga penanaman modal cenderung menghindari dari daerah-daerah yang rawan konflik seperti Aceh, Maluku, dan Papua. Meningkatnya gangguan keamanan, meskipun bersifat lokal, dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap iklim investasi nasional yang pada gilirannya akan mengakibatkan kekhawatiran investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia atau menunda realisasi dari rencana investasinya
6. Kurang intensifnya investasi, termasuk intensif perpajakan dalam menarik penanaman modal di Indonesia. Dibandingkan dengan Negara-negara lain, intensif perpajakan di Indonesia relatif tertinggal. Meskipun dengan tingkat pajak progresif yang diperkirakan relatif sama dengan Negara-negara lain, sistem perpajakan di Indonesia tidak memberikan pembebasan pajak (tax holiday) untuk jangka waktu tertentu dan relatif tertinggal dalam memberikan keringanan pajak (tax allowances).

#### 2.1.4.3 Investasi dan GDP

Investasi merupakan unsur GDP yang paling sering berubah. Ketika pengeluaran atas barang dan jasa turun selama resesi, sebagian besar dari penurunan itu berkaitan dengan anjloknya pengeluaran investasi. Para ekonom mempelajari investasi untuk memahami fluktuasi dalam output barang dan jasa perekonomian dengan lebih baik. Model GDP seperti model IS-LM didasarkan pada fungsi investasi sederhana yang mengaitkan investasi dengan tingkat bunga riil;  $I = I(r)$ . Fungsi itu menyatakan bahwa kenaikan tingkat bunga riil menurunkan investasi (Mankiw, 2003).

Ada tiga jenis pengeluaran investasi, yaitu investasi tetap bisnis, investasi residensial dan investasi persediaan. Investasi tetap bisnis mencakup peralatan dan struktur yang dibeli perusahaan untuk proses produksi. Investasi residensial, mencakup rumah baru yang orang beli untuk tempat tinggal dan yang dibeli tuan tanah untuk disewakan. Investasi persediaan mencakup barang-barang yang disimpan perusahaan di gudang, termasuk bahan-bahan persediaan, barang dalam proses, dan barang jadi.

Perusahaan-perusahaan swasta melakukan investasi dalam jenis-jenis modal tradisional, seperti pabrik baja, dan jenis-jenis modal seperti computer. Pemerintah melakukan investasi dalam berbagai bentuk modal masyarakat, yang disebut infrastruktur, seperti jalan raya, jembatan dan sistem pembuangan air.

Para pembuat kebijakan yang berusaha mendorong pertumbuhan ekonomi harus menghadapi isu tentang jenis-jenis modal apa yang paling

dibutuhkan perekonomian. Dengan kata lain modal apakah yang menghasilkan produk marginal tertinggi. Dalam hal ini, pasar dapat diandalkan untuk mengalokasikan tabungan ke jenis-jenis investasi alternatif. Industri-industri dengan produk marginal modal tertinggi secara alami akan bersedia meminjam pada tingkat bunga pasar untuk mendanai investasi baru. Pemerintah disarankan untuk menciptakan tingkat investasi yang menghasilkan untuk berbagai jenis modal, misalnya dengan meyakinkan bahwa sistem pajak memperlakukan seluruh jenis modal secara adil. Pemerintah kemudian bisa mengandalkan pasar untuk mengalokasikan modal secara efisien (Mankiw, 2003).

#### **2.1.4.4 *Incremental Capital Output Ratio (ICOR)***

Perencanaan pembangunan pada dasarnya akan ditentukan oleh kemampuan penyediaan sumber pembiayaan atas dana untuk diinvestasikan guna mencapai laju pertumbuhan dan tingkat kesejahteraan yang hendak dicapai. Untuk keperluan analisis ini, biasanya digunakan konsep *Incremental Capital Output Ratio (ICOR)*. ICOR adalah suatu angka perbandingan yang memberikan informasi tentang seberapa besar investasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan output perekonomian (Sitompul, 2007).

Perhitungan yang diperoleh berupa angka yang menunjukkan perbandingan antara investasi yang diperlukan untuk dapat meningkatkan tambahan pendapatan atau output. Angka ini dihitung untuk perkiraan kebutuhan secara menyeluruh maupun sektoral. Dengan angka ICOR ini akan



dapat dihitung perkiraan kebutuhan investasi secara total serta alokasi sektoral.

*Incremental Capital Ouput Ratio* (ICOR) atau rasio kenaikan ouput akibat kenaikan kapital adalah indikator ekonomi makro yang sering digunakan untuk menilai kinerja investasi di suatu negara. Kegunaan lainnya adalah untuk menghitung besarnya investasi yang dibutuhkan agar perekonomian tumbuh dengan laju yang sudah ditetapkan. ICOR secara konsep dirumuskan:

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y}$$

Dimana:

ICOR = *Incremental Capital Ouput Ratio*, adalah besarnya penambahan capital

$\Delta K$  = perubahan nilai kapital atau nilai investasi

$\Delta Y$  = perubahan nilai output

Sebagai ilustrasi, arti dari angka ICOR sebesar 3.0 adalah agar output perekonomian naik satu rupiah dibutuhkan tambahan kapital senilai 3.0 rupiah. Perhitungan angka ICOR biasanya bukan dari perubahan kapital dan output tahun per tahun, melainkan dihitung dalam selang waktu yang relatif panjang, misalnya 5 tahun. Sebab penambahan kapital pada tahun ini tidak otomatis diikuti oleh penambahan output pada tahun ini juga, melainkan baru akan muncul pada satu atau dua tahun yang akan datang. Selain itu masa yang dibutuhkan dari waktu penambahan kapital sampai dengan menghasilkan output akan berbeda-beda dari sektor yang satu dengan sektor lainnya.

Sebagai contoh penambahan capital (investasi) pada sektor bangunan akan mendatangkan output paling cepat pada 2–3 tahun yang akan datang. Di sisi lain penambahan kapital (investasi) untuk kegiatan perdagangan, dipastikan akan mendatangkan output dalam jangka waktu kurang dari satu tahun setelah investasi.

Angka ICOR bervariasi dari suatu negara ke negara lainnya, hal ini bergantung pada tingkat efisiensi ekonomi suatu negara. Semakin tinggi angka ICOR, semakin tidak efisien kegiatan produksi di negara tersebut, demikian sebaliknya. Indonesia pada beberapa waktu yang lalu pernah memiliki angka ICOR 4.5. Pada periode yang sama negara-negara maju di dunia umumnya memiliki angka ICOR tidak lebih dari 3.0. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi ekonomi dari kegiatan produksi di Indonesia jauh di bawah negara-negara maju.

## **2.1.5 APBD**

### **2.1.5.1 Pengertian Anggaran Daerah**

Kebijaksanaan daerah terhadap pendapatan dan pengeluaran daerah direncanakan dalam anggaran, menurut para ahli ekonomi bahwa anggaran dapat diartikan suatu daftar atau pernyataan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran Negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu yang biasanya adalah satu tahun. Sedangkan menurut Due dan Friendleander menyatakan bahwa anggaran adalah suatu rencana pembelanjaan yang merupakan suatu dasar untuk pengambilan keputusan

pengeluaran dan pengawasan selanjutnya atas pengeluaran-pengeluaran (Kuncoro, 2004).

Dari kedua pendapat diatas dapat diambil suatu rumusan bahwa anggaran adalah rencana yang telah disusun secara sistematis dalam bentuk angka dari uang dan merupakan dasar untuk pengambilan keputusan penerimaan, pengeluaran dan pengawasan dalam waktu ke waktu.

Dalam Undang-undang No. 5 tahun 1974, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah suatu hal yang sangat penting, yaitu:

- a. Untuk menentukan jumlah pajak yang di bebankan kepada rakyat daerah yang bersangkutan
- b. Merupakan suatu saran untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab
- c. Memberikan isi dan arti kepada tanggung jawab Pemerintah Daerah umumnya dan Kepala daerah khususnya, karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah itu menggambarkan seluruh kebijaksanaan pemerintah.
- d. Merupakan suatu sarana untuk melaksanakan pengawasan terhadap daerah dengan cara yang lebih mudah.
- e. Merupakan suatu pemberian kuasa kepada Kepala Daerah untuk melakukan penyelenggaraan keuangan di daerah di dalam batas-batas tertentu.

Anggaran merupakan suatu alat untuk perencanaan mengenai pengeluaran dan penerimaan (pendapatan) dimasa yang akan datang,

umumnya disusun untuk satu tahun. Di samping itu anggaran merupakan alat kontrol atau pengawasan terhadap baik pengeluaran maupun pendapatan di masa yang akan datang. Sejak tahun 1967 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) di Indonesia disusun dan diberlakukan mulai tanggal 1 April sampai dengan tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Namun khusus tahun 2000, tahun anggaran akan dimulai pada tanggal 1 april dan berakhir tanggal 31 Desember di tahun yang sama. Untuk tahun-tahun berikutnya tahun anggaran akan dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember pada tahun yang sama.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selalu mempunyai dua sisi, yaitu sisi penerimaan atau pendapatan dan sisi pengeluaran atau belanja.

#### **2.1.5.2 Penerimaan Daerah**

##### **2.1.5.2.1 Pendapatan Asli Daerah**

Dengan berlakunya Undang-undang Otonomi Daerah No. 22 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada tanggal 1 Januari 2001, maka pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatannya dan menjalankan pembangunan serta kewenangan yang lebih luas dalam mendapatkan sumber-sumber pembiayaan, baik yang berasal dari daerah maupun dari APBN.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) diatur dalam undang-undang No. 34 tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Undang-undang tersebut



merupakan perubahan atau perbaikan UU No. 18 tahun 1997 terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi dan Bagian Laba Perusahaan Daerah (BLPD).

#### **2.1.5.2.1.1 Pajak Daerah**

Undang-undang No. 34 tahun 2000 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi, sekaligus menetapkan pengaturan dalam menjamin penerapan prosedur umum Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.

Menurut UU No. 18 tahun 1997 menyebutkan bahwa pajak daerah disebutkan sebagai pajak yang berarti iuran wajib yang dilakukan pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Sebelum terbit UU No. 18 tahun 1997, Pajak Daerah kabupaten/kota mencapai 50 jenis, walaupun yang dapat direalisasikan hanya 8 hingga 12 jenis pajak saja. Artinya terdapat berbagai jenis pajak daerah yang secara ekonomis kurang memenuhi syarat prinsipel, sedangkan biaya administrasi pemungutan akan lebih besar dibandingkan dengan hasil penerimaan pajak yang akan diterima oleh daerah.

Adapun pasal 2 ayat (1) dan (2) dalam UU No. 18 tahun 1997 menyebutkan jenis-jenis pajak daerah yaitu:

- a. Jenis pajak daerah Tingkat I terdiri dari:
  - Pajak kendaraan bermotor

- Bea balik nama kendaraan bermotor
  - Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- b. Jenis pajak daerah Tingkat II terdiri dari:
- Pajak hotel dan restaurant
  - Pajak hiburan
  - Pajak reklame
  - Pajak penerangan jalan
  - Pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C
  - Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

Tarif pajak daerah Tingkat I ditetapkan dengan peraturan pemerintah dan penetapannya seragam di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk daerah Tingkat II ditetapkan oleh Peraturan Daerah masing-masing dan peraturan daerah tentang pajak daerah tidak dapat berlaku surut. Memperhatikan sumber pendapatan asli daerah masing-masing sangat bervariasi.

#### **2.1.5.2.1.2 Retribusi Daerah**

Retribusi adalah pungutan yang dikenakan kepada pemakai jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Retribusi sampah dan retribusi pasar misalnya, harus dibayar oleh pengguna jasa-jasa tersebut, karena mereka menikmati langsung. Dalam UU No. 34 tahun 2000, jenis retribusi air, pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan, serta retribusi bahan galian golongan C dikategorikan sebagai pajak. Jasa-jasa yang

dipungut retribusinya dan penetapan tarifnya dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu:

- a. Retribusi Jasa Umum, berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Penetapan tariff pada dasarnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai jenis-jenis retribusi yang berhubungan kepentingan nasional. Disamping itu tetap memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
- b. Retribusi Jasa Usaha, berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang langsung. Pendetapan tarifnya ditetapkan oleh daerah sehingga dapat memadai jika jasa keuntungan yang layak, yaitu yang dapat dianggap memadai jika jasa yang bersangkutan diselenggarakan swasta.
- c. Retribusi Perizinan, berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Untuk pemberian izin bangunan misalnya, dapat diperhitungkan biaya pengecekan dan pengukuran lokasi, biaya pemetaan dan biaya pengawasan.

#### **2.1.5.2.1.3 Penerimaan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya**

Selain pajak daerah dan retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah merupakan salah satu sumber yang cukup potensial untuk

dikembangkan. Beberapa kendala yang dihadapi oleh perusahaan milik daerah seperti kelemahan manajemen, masalah kepegawaian dan terlalu banyak campur tangan pejabat daerah sehingga tidak berjalan dengan efisien. Dalam menghadapi beban dan kurang mandiri, sehingga kebanyakan merugi dan menjadi beban APBD. Perusahaan daerah seperti perusahaan air bersih (PDAM), bank pembangunan daerah, hotel, bioskop, percetakan, perusahaan bus kota dan pasar jenis-jenis BUMD yang memiliki potensi sebagai sumber-sumber PAD, menciptakan lapangan kerja dan mendorong pembangunan ekonomi daerah.

Sesuai Undang-undang No. 5 tahun 1962 tentang perusahaan daerah bertujuan untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya, dan pembangunan ekonomi nasional umumnya, dalam rangka ekonomi terpinpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat adil dan makmur. Jenis-jenis perusahaan daerah yang terdapat di Indonesia meliputi kegiatan-kegiatan:

- a. Penyediaan Air Minum
- b. Pengeloalaan Persampahan
- c. Pengeloalaan Air Kotor
- d. Rumah Pemotongan Hewan
- e. Pengelolaan Pasar
- f. Pengelolaan Objek Wisata
- g. Pengelolaan Saran Wisata



- h. Perbankan dan Perkreditan
- i. Penyediaan Perumahan dan Pemukiman
- j. Penyediaan Transportasi
- k. Industry Lainnya

#### **2.1.5.2.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.**

Pendapatan asli daerah tidak seluruhnya memiliki kesamaan, terdapat pula sumber-sumber pendaptan lainnya, yaitu penerimaan lain-lain yang sah, kelompok penerimaan lain-lain dalam pendapatan daerah tingkat II mencakup berbagai penerimaan kecil-kecil, seperti hasil penjualan alat berat dan bahan jasa, penerimaan dari sewa, bunga simpanan giro dan bank serta penerimaan dari denda kontraktor. Namun walaupun demikian sumber penerimaan daerah sangat tergantung pada potensi daerah itu sendiri.

#### **2.1.5.2.2 Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah**

Selain dari pendapatan asli daerah, sumber penerimaan pemerintah daerah otonom kabupaten/kota berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Nada perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah adalah salah satu bentuk kebijakan desentralisasi dibidang fiskal yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada daerah.

Oleh karena itu desentralisasi fiskal yang dilaksanakan melalui perimbangan keuangan akan meningkatkan kemampuan daerah untuk membangun dan meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat

daerah, artinya bukan sekedar pembagian dana, lalu memindahkan korupsi, kolusi dan nepotisme dari pusat ke daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 104 tahun 2000, ada tiga sumber dana Perimbangan:

- a. Dana Bagi Hasil dan Penerimaan Sumber Daya Alam
- b. Dana Alokasi Umum (DAU)
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

#### **2.1.5.2.2.1 Dana Bagi Hasil (DBH)**

Salah satu komponen dari dana perimbangan keuangan dari pemerintah pusat dan daerah yaitu pembagian hasil penerimaan sumber daya alam dan penerimaan perpajakan. Termasuk dalam pembagian hasil perpajakan adalah pajak perseorangan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan pembagian hasil penerimaan dari sumber daya alam berasal dari minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan dan perikanan.

Sementara pembagian hasil sumber daya alam jelas-jelas menguntungkan daerah-daerah kaya sumber daya alam berhubungan pembagiannya didasarkan pada alokasi atau letak sumber daya alam bersangkutan. Bagi hasil ini diatur dalam UU No. 25 tahun 1999 sebagai jawaban tuntutan daerah dan praktis memang mengurangi ketimpangan fiskal pusat dengan daerah.

#### **2.1.5.2.2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)**

Di era otonom daerah, distribusi dana alokasi umum atau dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah telah dilakukan sampai sekarang, namun belum memuaskan. DAU belum dapat secara utuh menjalankan dan merealisasikan amanat UU No. 25 tahun 1999 dimana DAU sebagai alat pemerata. Kebanyakan DAU bukan jadi solusi setelah sampai di daerah-daerah malah menyebabkan permasalahan, sehingga tujuan DAU sebagai pemerataan dari kekurangan di daerah tidak terealisasi dengan maksimal. Hal tersebut dikarenakan daerah menyalahgunakan DAU sebagai alat pemerataan.

#### **2.1.5.2.2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Menurut ketentuan peraturan pemerintah No. 104 tahun 2000 tentang dana perimbangan terdapat ketentuan mengenai dana alokasi khusus seperti berikut:

- a. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu dan membiayai kebutuhan khusus dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN.
- b. Kebutuhan khusus yang dibiayai dengan DAK yaitu kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan menggunakan rumus DAU dan atau kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional
- c. 40% dari penerimaan Negara yang berasal dari dana reboisasi disediakan kepada daerah sebagai DAK untuk membantu membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan.

- d. Kriteria teknis sektor/kegiatan yang dapat dibiayai dari DAK ditetapkan oleh Menteri teknis terkait.
- e. DAK diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan usulan daerah. Penyediaan DAK memerlukan adanya dana pendamping sebesar 10% dari penerimaan umum APBN (kecuali DAK reboisasi)
- f. Pengalokasian DAK ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Menteri Teknis terkait dan instansi yang membidangi perencanaan pembangunan nasional
- g. Kegiatan yang tidak dapat dibiayai dari DAK yaitu biaya administrasi, biaya perjalanan dinas dan biaya administrasi umum dan lain-lain umum sejenis.
- h. Penyaluran DAK dilakukan oleh Menteri Keuangan.

Pemerintahan Daerah juga akan mengharapkan agar Pemerintah Pusat dapat memberikan kriteris-kriteria yang pasti dan leluasa kepada pemerintah daerah dalam menggunakan DAK, misalnya untuk membiayai masalah pengungsi, bencana alam, pemekaran daerah serta kondisi tertentu.

#### **2.1.5.2.3 Pinjaman Daerah**

Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menetapkan bahwa pinjaman daerah adalah salah satu sumber penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang dicatat dan dikelola dalam APBD.

Dana pinjaman merupakan pelengkap dari sumber-sumber penerimaan daerah yang ada dan ditujukan untuk membiayai pengadaan



prasarana daerah atau harta tetap lainnya yang berkaitan dengan kegiatan yang bersifat meningkatkan penerimaan yang dapat digunakan untuk mengembalikan pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat. Selain itu, daerah dimungkinkan melakukan pinjaman untuk mengatasi masalah jangka pendek yang berkaitan dengan kas daerah. Adapun sumber-sumber pinjaman daerah adalah sebagai berikut.

#### **2.1.5.2.3.1 Sumber Pinjaman Daerah dari Dalam Negeri**

- a. Pemerintah Pusat. Ketentuan-ketentuan mengenai pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat seperti jenis, jangka waktu pinjaman, masa tenggang, tingkat bunga, cara penghitungan dan pembayaran bunga, pengadministrasian dan penyaluran dari pinjaman, ditetapkan oleh Menteri Keuangan
- b. Lembaga Keuangan Bank. Pelaksanaan pinjaman daerah yang bersumber dari lembaga keuangan bank mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Lembaga Keuangan Bukan Bank. Pelaksanaan pinjaman daerah yang bersumber dari lembaga keuangan bank mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d. Masyarakat.  
  
Pinjaman daerah dari masyarakat melalui penerbitan obligasi daerah. Pelaksanaan dan pembayaran kembali obligasi daerah mengikuti peraturan yang berlaku.

- e. Sumber lainnya. Pinjaman daerah lainnya yang berasal dari pemerintah daerah lain.
- f. Pinjaman daerah dari luar negeri dapat berupa pinjaman bilateral atau pinjaman multilateral.

#### **2.1.5.2.4 Lain-lain Penerimaan Daerah yang Sah.**

Lain-lain penerimaan yang sah mencakup hibah atau penerimaan dari Daerah Propinsi atau Daerah Kabupaten/Kota lainnya dan penerimaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **2.1.5.3 Pengeluaran Pemerintah**

##### **2.1.5.3.1 Pengertian Pengeluaran Pemerintah**

Pengeluaran pemerintah berperan untuk mempertemukan permintaan masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang tidak dapat dipenuhi oleh swasta. Dikatakan pula bahwa pengeluaran pemerintah yang dinyatakan dalam belanja pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam proyek-proyek yang mengacu pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, peningkatan kesejahteraan, dan program yang menyentuh langsung kawasan yang terbelakang. Pemerintah daerah dituntut dapat berperan aktif dalam mengelola dan mengembangkan sektor publik dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pendekatan pada upaya peningkatan pertumbuhan tidak semata-mata menentukan pertumbuhan sebagai satu-satunya tujuan pembangunan daerah, namun pertumbuhan merupakan salah satu ciri pokok terjadinya proses

pembangunan. Terdapat berbagai instrumen yang digunakan pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian. Salah satu diantaranya adalah pembelanjaan atau pengeluaran pemerintah. Apabila pemerintah menetapkan kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Pengeluaran pemerintah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Pertama, pembelian faktor-faktor produksi (input) dan pembelian produk (output). Kedua, untuk pengeluaran konsumsi pemerintah (belanja rutin) serta untuk investasi pemerintah (belanja pembangunan/barang-barang modal) (Boediono, 1998). Pengeluaran pemerintah yang diukur dari pengeluaran rutin dan pembangunan mempunyai peranan dan fungsi cukup besar mendukung sasaran pembangunan dalam menunjang kegiatan pemerintah serta peningkatan jangkauan dan misi pelayanan yang secara langsung berkaitan dengan pembentukan modal untuk tujuan peningkatan produksi. Layaknya pengeluaran masyarakat, maka pengeluaran pemerintah akan memperbesar permintaan agregat melalui *multiplier effect* dan selanjutnya akan meningkatkan produksi atau penawaran agregat, sehingga PDRB akan meningkat. Meningkatnya PDRB merupakan indikasi tumbuhnya suatu perekonomian yang akan menambah penerimaan. Pengeluaran pemerintah akan menjadi seiring dengan peningkatan kegiatan ekonomi suatu Negara. Walaupun demikian, peningkatan pengeluaran pemerintah belum

tentu berakibat baik terhadap aktivitas perekonomian. Oleh karena itu, perlu juga dilihat efisiensi penggunaan pengeluaran pemerintah tersebut.

Suparmoko (2000), menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dapat di nilai dari berbagai segi sehingga dapat dibedakan menjadi:

- a. Pengeluaran itu merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa-masa yang akan datang
- b. Pengeluaran itu langsung memberikan kesejahteraan dan kegembiraan bagi masyarakat
- c. Pengeluaran merupakan penghematan pengeluaran yang akan datang
- d. Pengeluaran menyediakan kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran tenaga kerja yang lebih luas.

#### **2.1.5.3.2 Jenis-Jenis Pengeluaran Pemerintah**

##### **2.1.5.3.2.1 Pengeluaran Rutin**

Pengeluaran rutin yaitu pengeluaran untuk pemeliharaan atau penyelenggaraan roda pemerintahan sehari-hari, meliputi: belanja pegawai, belanja barang berbagai macam subsidi (subsidi daerah dan subsidi harga), angsuran dan bunga utang pemerintah serta jumlah pengeluaran lain.

Anggaran belanja rutin memegang peranan penting untuk menunjang kelancaran mekanisme sistem pemerintahan serta upaya peningkatan efisiensi dan produktifitas, yang pada gilirannya akan menunjang tercapainya sasaran dan tujuan setiap tahap pembangunan. Penghematan dari efisiensi pengeluaran rutin perlu dilakukan untuk menambah besarnya tabungan



pemerintah yang diperlukan untuk membiayai pembangunan nasional. Penghematan dan efisiensi tersebut antara lain diupayakan melalui pinjaman alokasi pengeluaran rutin, pengendalian dan koordinasi pelaksanaan pembelian barang dan jasa kebutuhan departemen/lembaga Negara non departemen dan pengurangan berbagai macam subsidi secara bertahap.

#### **2.1.5.3.2 Pengeluaran Pembangunan**

Pengeluaran pembangunan yaitu pengeluaran yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan baik prasarana fisik dan non fisik. Pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran yang ditunjukkan untuk membiayai program-program pembangunan sehingga anggarannya selalu dapat disesuaikan dengan dana yang dimobilisasi. Dana ini kemudian dialokasikan pada berbagai bidang sesuai dengan prioritas yang direncanakan.

Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah itu. Semakin besar dan semakin banyak kegiatan pemerintah, semakin besar pula pengeluaran pemerintah bersangkutan.

#### **2.1.5.4 Teori Pengeluaran Pemerintah**

##### **2.1.5.4.1 Model Pembangunan Tentang Teori Perkembangan Pengeluaran Pemerintah**

Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Pada tahap awal perkembangan, menurut mereka rasio pengeluaran

pemerintah terhadap pendapatan nasional relatif besar. Hal ini dikarenakan pada tahap ini pemerintah harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan guna memacu pertumbuhan agar dapat lepas landas. Dalam suatu proses pembangunan, menurut Musgrave rasio investasi total terhadap pendapatan nasional akan semakin mengecil. Sementara itu Rostow berpendapat bahwa pada tahap lanjutan pembangunan terjadi peralihan aktivitas pemerintah, dari penyediaan prasarana ekonomi ke pengeluaran-pengeluaran untuk pelayanan sosial seperti kesehatan dan pendidikan.

#### 2.1.5.4.2 Hukum Wagner

Pengamatan empiris oleh Wagner terhadap Negara-negara Eropa, Amerika Serikat dan Jepang pada abad ke-19 menunjukkan bahwa aktivitas pemerintah dalam perekonomian cenderung semakin meningkat. Wagner mengukur perbandingan pengeluaran pemerintah terhadap produk nasional. Wagner menamakan hukum aktivitas pemerintah yang selalu meningkat (*law of ever increasing state activity*).

Hukum tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{P_k PP_1}{PPK_1} < \frac{P_k PP_2}{PPK_2} < \dots < \frac{P_k PP_n}{PPK_n}$$

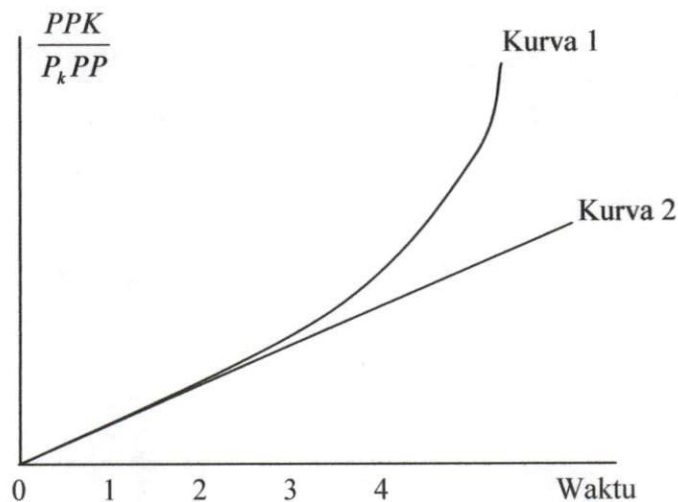
Dimana :

$P_k PP$  : pengeluaran pemerintah perkapita

$PPK$  : pendapatan per kapita, yaitu GDP/jumlah penduduk

1,2,...,n : Jangka waktu (tahun)

Hukum Wagner ini ditunjukkan dalam gambar 2.1 dimana kenaikan pengeluaran pemerintah mempunyai bentuk eksponensial yang ditunjukkan oleh kurva 1 dan bukan seperti yang ditunjukkan oleh kurva 2.



Sumber : Vita Agustina 2006

Gambar 2.1 Pertubumbuhan Pengeluaran Pemerintah menurut Wagner

#### 2.1.5.4.3 Teori Peacock dan Wisemen

Peacock dan Wisemen adalah dua orang yang mengemukakan teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang terbaik. Pandangan mereka mengenai pengeluaran pemerintah adalah bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut.

Menurut Peacock dan Wisemen, perkembangan ekonomi menyebabkan pungutan pajak meningkat yang meskipun tarif pajaknya mungkin tidak berubah pada gilirannya mengakibatkan pengeluaran pemerintah meningkat pula. Jadi dalam keadaan normal, kenaikan pendapatan nasional menaikkan pula baik penerimaan maupun pengeluaran pemerintah.

Apabila keadaan normal jadi terganggu, katakanlah karena perang atau eksternalitas lainnya maka pemerintah terpaksa harus memperbesar pengeluarannya untuk mengatasi gangguan yang dimaksud. Konsekuensinya timbul tuntutan untuk memperoleh penerimaan pajak lebih besar.

#### **2.1.5.4.4 Teori Mikro**

Tujuan dari teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang akan disediakan tersebut selanjutnya akan menimbulkan permintaan akan barang lain.

Sebagai contoh, misalnya pemerintah akan membuat sebuah pelabuhan udara baru. Pelaksanaan pembuatan pelabuhan udara baru tersebut menimbulkan permintaan akan barang lain yang dihasilkan oleh sektor swasta, seperti semen, baja, alat-alat pengangkutan dan sebagainya.



### **2.1.6 Pengangguran**

Pengangguran merupakan masalah makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan masalah yang paling berat (Mankiw, 2003). Pengangguran adalah seseorang yang tergolong angkatan kerja dan ingin mendapat pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya (Dumairy, 1996). Masalah pengangguran yang menyebabkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mencapai potensi maksimal yaitu masalah pokok makro ekonomi yang paling utama.

#### **2.1.6.1 Jenis-jenis pengangguran**

Pengangguran sering diartikan sebagai angkatan kerja yang belum bekerja atau tidak bekerja secara optimal. Berdasarkan pengertian diatas, maka pengangguran dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu :

- a. Pengangguran terselubung (disguised unemployment) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu.
- b. Setengah menganggur (under unemployment) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu.
- c. Pengangguran terbuka (open unemployment) adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal.

### **2.1.6.2 Macam-macam Pengangguran Berdasarkan Penyebab Terjadinya**

- a. Pengangguran konjungtal (cycle unemployment) adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan gelombang (naik-turunnya) kehidupan perekonomian/siklus ekonomi.
- b. Pengangguran struktural (structural unemployment) adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi dan corak ekonomi dalam jangka panjang. Pengangguran struktural bisa diakibatkan oleh beberapa kemungkinan, seperti :
  - Akibat permintaan berkurang
  - Akibat kemajuan dan penggunaan teknologi
  - Akibat kebijakan pemerintah
- c. Pengangguran friksional (frictional unemployment) adalah pengangguran yang muncul akibat adanya ketidaksesuaian antara pemberi kerja dan pencari kerja. Pengangguran ini sering disebut pengangguran sukarela.
- d. Pengangguran musiman adalah pengangguran yang muncul akibat pergantian musim misalnya pergantian musim tanam ke musim panen.
- e. Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang terjadi akibat perubahan atau penggantian tenaga manusia menjadi tenaga mesin-mesin
- f. Pengangguran siklus adalah pengangguran yang diakibatkan oleh menurunnya kegiatan perekonomian (karena terjadi resesi).

Pengangguran siklus disebabkan oleh kurangnya permintaan masyarakat (aggrerat demand).

#### **2.1.6.3 Sebab-sebab Terjadinya Pengangguran**

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran adalah sebagai berikut:

- a. Besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja.  
Ketidakseimbangan terjadi apabila jumlah angkatan kerja lebih besar daripada kesempatan kerja yang tersedia. Kondisi sebaliknya sangat jarang terjadi.
- b. Struktur lapangan kerja tidak seimbang
- c. Kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga terdidik tidak seimbang.

Apabila kesempatan kerja jumlahnya sama atau lebih besar daripada angkatan kerja, pengangguran belum tentu tidak terjadi. Alasannya, belum tentu terjadi kesesuaian antara tingkat pendidikan yang dibutuhkan dan yang tersedia. Ketidakseimbangan tersebut mengakibatkan sebagian tenaga kerja yang ada tidak dapat mengisi kesempatan kerja yang tersedia.

- d. Penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah tidak seimbang

Jumlah angkatan kerja disuatu daerah mungkin saja lebih besar dari kesempatan kerja, sedangkan di daerah lainnya dapat terjadi keadaan sebaliknya. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan

perpindahan tenaga kerja dari suatu daerah ke daerah lain, bahkan dari suatu negara ke negara lainnya.

## **2.2 Tinjauan Empiris**

Sebelum melakukan analisis terhadap permasalahan ini, terlebih dahulu dilakukan studi atau tinjauan mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi PDRB, lalu didapat temuan empiris terhadap persamaan pengaruh Investasi, APBD dan Pengangguran terhadap PDRB. Untuk melihat hubungan dari factor-faktor tersebut digunakan analisis regresi linear berganda.

Athukorala Wasantha (2003) dengan penelitian yang berjudul Dampak Investasi Asing Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara Sri Lanka. Hasil dari penelitian tersebut mengatakan bahwa pengaruh dari investasi asing langsung terhadap pertumbuhan ekonomi belum begitu kuat. Akan tetapi malah terjadi sebaliknya, hubungan pertumbuhan ekonomi sangat berpengaruh terhadap investasi asing di Negara Sri Lanka. Namun bukan berarti investasi asing tidak begitu penting di Sri Lanka. Ini terjadi karena iklim investasi yang belum membaik di Sri Lanka akibat pemerintahan yang korupsi, politik dan situasi di Negara Sri Lanka yang masih buruk.

Menurut Graham.M Edward dan Wada Erika (2001) dengan penelitian yang berjudul Investasi Asing Langsung di China ditemukan hasil bahwa pengaruh investasi asing terhadap pertumbuhan ekonomi di China memiliki hubungan yang kuat. Namun perkembangan investasi asing terbesar hanya



terjadi di daerah pesisir China. Dibandingkan daerah lainnya, penanaman investasi di daerah pesisir sudah terjadi sejak tahun 1991. Namun di daerah bagian utara China pada saat sekarang ini perkembangan pertumbuhan investasi asing sudah mulai meningkat.

Arpaia Alfonso dan Turrini Alessandro (2010) dengan penelitian yang berjudul *Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi di Uni Eropa (EU)* dengan kecenderungan jangka panjang dan penyesuaian jangka pendek. Data yang digunakan yaitu di daerah Uni-Eropa dalam 15 negara dengan periode 1970-2003. Hasil yang ditemukan adalah sesuai dengan hipotesis yang diajukan sebelumnya, yaitu pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di EU. Di Negara yang memiliki tingkat hutang yang rendah dan peraturan perekonomian yang lemah, penyesuaian dari pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi terjadi selama 3 tahun. Tetapi ditemukan perbedaan yang signifikan, yaitu Negara-negara secara umum atau Negara besar di Eropa memiliki penyesuaian pengeluaran pemerintah yang cepat, sedangkan Negara-negara bagian selatan Eropa masih tergolong lambat dalam penyesuaian pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonominya.

Saez.P Marta dan Garcia A Santiago (2002), dengan judul penelitian yaitu *Pengeluaran Pemerintah di Negara-negara bagian Eropa (EU)*. Berdasarkan data yang termasuk di dalam penelitian, didapatkan hasil bahwa terjadinya pengaruh yang signifikan antara pengeluaran pemerintah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi di Negara-negara bagian Eropa (EU).

Menurut Nurudeen Abu (2008) dalam tesis yang berjudul *Belanja Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi di Nigeria periode 1970-2008* melihat hasil bahwa pengeluaran modal pemerintah (TCAP), pengeluaran rutin pemerintah (TREC), dan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan (EDU) berpengaruh negative terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, peningkatan pengeluaran pemerintah pada transportasi dan komunikasi (TRACO), dan kesehatan (HEA) menunjukkan hasil yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Nigeria.

Brauninger Michael dan Pannenberg Markus (2000), dalam penelitian yang berjudul *Pengangguran dan Pertumbuhan Produktifitas* dan menggunakan data dari 13 negara OECD, memperlihatkan hasil bahwa pengangguran memiliki dampak yang negative terhadap pertumbuhan produktifitas. Namun tidak ditemukannya hubungan yang signifikan antara modal manusia terhadap produktifitas. Hal tersebut dikarenakan kesalahan dalam pengukuran substansial dalam data antarnegara. Jika asuransi pengangguran dimasukkan dalam penelitian ini, terjadi hubungan yang negatif antara asuransi pengangguran terhadap tabungan. Dengan demikian pengangguran mengurangi produktifitas bahkan jika modal manusia tidak produktif.

Boldea Monica, Otil Maria dan Parean Mihai (2009), dalam judul penelitian *Analisis Pengaruh Pengangguran di Romania* memperlihatkan bahwa tidak terjadinya hubungan negatif antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi di Rumania. Hal ini bertolak belakang dengan Hukum Law yang

menyatakan bahwa peningkatan pengangguran mengakibatkan penurunan output. Dalam kasus ini peneliti tidak memberikan alasan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Namun peneliti hanya menyimpulkan bahwa hubungan terbalik antara dua variabel yang diteliti menunjukkan adanya suatu ketertinggalan atau keterlamabatan.

Pengaruh pengeluaran pemerintah kota Medan terhadap pertumbuhan ekonomi kota Medan oleh Vita Agustina Uliano Sinaga pada tahun 2006. Dalam penelitiannya menggunakan PDRB harga konstan untuk variabel terikat, pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan untuk variable bebas dengan menggunakan program Eviews 4.0. hasilnya adalah pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan ekonomi kota MEndan dengan tingkat kepercayaan 95%.

Nazara, 1997 mengadakan penelitian dengan judul Pertumbuhan Ekonomi Regional Indonesia. Hasil penelitian yang dilakukan tentang pengaruh penggunaan variabel demografi dalam model pertumbuhan ekonomi daerah pada 25 propinsi di Indonesia adalah bahwa variabel pembentukan modal, tenaga kerja, mutu modal manusia dan aglomerasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PDRB masing-masing daerah penelitian tersebut.

Peranan APBD dalam pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara oleh Nining pada tahun 2004. Dalam penelitiannya menggunakan PDRB harga konstan untuk variable terikat, pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan untuk variable bebas dengan menggunakan program SPSS 10.

Hasilnya adalah pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan berpengaruh nyata dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada tingkat kepercayaan 95%.

Menurut Heliana (2010), dalam skripsinya yang berjudul Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja terhadap PDRB Propinsi Bengkulu. Secara Parsial hanya variabel investasi yang secara signifikan mempengaruhi PDRB Propinsi Bengkulu. Sedangkan variabel tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap PDRB propinsi Bengkulu. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,795 artinya 79,5 persen PDRB Propinsi Bengkulu ditentukan oleh investasi dan tenaga kerja.

Pertumbuhan ekonomi dan pengangguran di Indonesia oleh Yuan Acitra pada tahun 2009, dengan data series tahun 1988-2007. Hasilnya pengangguran berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

### 2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah suatu pernyataan yang dikemukakan dan masih lemah kebenarannya. Dari tinjauan empiris di atas, diperoleh hipotesis sebagai berikut:

- a. Tingkat investasi, APBD dan Pengangguran secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
- b. Tingkat investasi, APBD dan Pengangguran secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dari segi pendekatan dibagi menjadi dua macam yaitu, pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif pada dasarnya menekankan analisisnya pada data-data numerikal (angka) yang diolah dengan metode statistika. Pada dasarnya, pendekatan kuantitatif dilakukan pada penelitian inferensial (dalam rangka pengujian hipotesis) dan menyandarkan kesimpulan hasilnya pada suatu probabilitas kesalahan penolakan hipotesis nihil. Dengan metode kuantitatif akan diperoleh signifikansi perbedaan kelompok atau signifikansi hubungan antar variabel yang diteliti (Azwar, 2001).

#### **3.2 Variabel Penelitian**

Variabel penelitian adalah suatu gejala yang bervariasi. Variabel juga dapat diartikan sebagai obyek penelitian yang menjadi titik pusat perhatian dari suatu penelitian. Variabel dalam penelitian ini antara lain :

##### **1. Variabel Bebas (*Independent Variables*)**

Variabel bebas adalah suatu variabel yang variasinya mempengaruhi variabel lain. Dapat pula dikatakan bahwa variabel bebas adalah variabel yang

pengaruhnya terhadap variabel lain ingin diketahui (Azwar, 2001). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas antara lain :

a. Tingkat investasi

Tingkat investasi merupakan jumlah uang yang ditanamkan untuk pembangunan industri atau proyek-proyek Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri. Investasi adalah pengeluaran atau perbelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian (Sukirno, 1994).

b. APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBD terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan. (Sanusi, 2004).

c. Pengangguran

Penduduk dalam usia kerja disebut sebagai tenaga kerja. Tenaga kerja terbagi menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (Dumairy, 1996). Angkatan kerja adalah tenaga kerja yang bekerja, atau mempunyai pekerjaan namun untuk sementara sedang tidak bekerja, dan yang mencari pekerjaan. Bukan angkatan kerja adalah tenaga kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan, dan sedang tidak mencari pekerjaan; yakni orang-orang

yang kegiatannya bersekolah (pelajar, mahasiswa), mengurus rumah tangga, serta menerima pendapatan tapi bukan merupakan imbalan langsung atas jasa kerjanya (pensiunan, penderita cacat yang dependen). Angkatan kerja dibedakan ke dalam dua subkelompok, yaitu pekerja dan penganggur. Pekerja ialah orang-orang yang mempunyai pekerjaan, mencakup orang yang mempunyai pekerjaan namun untuk sementara waktu kebetulan sedang tidak bekerja. Penganggur ialah orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Tingkat penganggur diukur sebagai suatu presentase dari angkatan kerja total yang tidak mempunyai pekerjaan terhadap seluruh angkatan kerja.

## **2. Variabel terikat/tergantung (*Dependent Variables*)**

Variabel tergantung adalah variabel penelitian yang diukur untuk mengetahui besarnya efek atau pengaruh variabel yang lain. Besarnya efek tersebut diamati dari ada tidaknya, timbul-hilangnya, membesar-mengecilnya, atau berubahnya variasi yang tampak sebagai akibat perubahan pada variabel lain (Azwar, 2001).

Variabel terikat atau tergantung dalam penelitian ini adalah PDRB. PDRB yaitu jumlah nilai produksi netto dari suatu barang dan jasa yang dihasilkan daerah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).

### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data *time series* periode tahun 1990-2008. Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh dari peneliti

dari subyek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia (Azwar, 2001).

Data yang digunakan meliputi: data PDRB, data investasi, data APBD, dan data Pengangguran. Data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik Sumatera Barat.

### 3.4 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode statistika untuk keperluan estimasi. Dalam metode statistika alat analisis yang biasa di pakai dalam khasanah penelitian adalah analisis regresi. Analisis regresi pada dasarnya adalah studi atas ketergantungan suatu variabel yaitu variabel yang tergantung pada variabel yang lain yang di sebut dengan variabel bebas dengan tujuan untuk mengestimasi dengan meramalkan nilai populasi berdasarkan nilai tertentu dari variabel yang di ketahui (Gujarati, 1996). Penelitian ini akan menggunakan persamaan regresi linear berganda dan di transformasikan dalam bentuk logaritma natural dengan menggunakan kuadrat terkecil dengan formulasi sebagai berikut :

$$\text{Ln } Y = \alpha + \beta_1 \text{ Ln } X_1 + \beta_2 \text{ Ln } X_2 + \beta_3 \text{ Ln } X_3 + \mu_i$$

(Algifari, 2000)

Dimana :

Y : PDRB

X1 : Tingkat Investasi

X2 : APBD



X3 : Pengangguran

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$  : koefisien masing-masing variabel

$\alpha$  : konstanta

$\mu_i$  : Residu

### 3.5 Pengujian Hipotesis

Untuk mengetahui kesalahan yang mungkin terjadi pada model regresi yang digunakan, maka dapat dilakukan penganalisaan hasil analisis yang diperoleh dengan beberapa pengujian sebagai berikut:

#### 3.5.1 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Untuk melihat proporsi variabel tidak bebas yang dapat diterangkan oleh variabel bebas, dipergunakan rumus koefisien determinasi ( $R^2$ ), yaitu (Gujarati. 1996);

$$R^2 = \frac{ESS}{TSS}$$

dengan:

$$ESS = b_1 \sum x_1 y + b_2 \sum x_2 y$$

$$TSS = \sum y^2$$

Untuk mengetahui berapa besarnya perubahan variabel tidak bebas yang dapat diterangkan oleh variabel bebas secara keseluruhan, dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi berganda ( $R^2$ ). Nilai ini bergerak dari nol sampai satu. Jika nilai  $R^2$  mendekati 1, berarti semakin besar perubahan variabel tidak bebas dapat diterangkan oleh variabel bebas,

sebaliknya jika  $R^2$  mendekati nol, hal ini berarti semakin kecil perubahan variabel tidak bebas yang dapat diterangkan oleh variabel bebas.

### 3.5.2 Uji F-test

Hasil uji F digunakan untuk melakukan pengujian yang mampu menerangkan keberartian variabel secara keseluruhan. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai F-test dengan nilai F-tabel. Secara statistik, rumus dari F-test adalah (Gujarati. 1996):

$$F = \frac{R^2}{1 - R^2} \frac{n - k}{k - 1}$$

dengan;

- F = Pengujian keseluruhan keberartian pengaruh variabel tidak bebas
- $R^2$  = Koefisien determinasi
- k = Jumlah parameter (b) termasuk konstanta
- n = Jumlah observasi
- $k-1 = v_1$  (degrees of freedom numerator)
- $n-k = v_2$  (degrees of freedom denominator)

Apabila F hitung  $>$  F tabel menunjukkan terdapat pengaruh secara bersama-sama dari variabel bebas terhadap variabel tidak bebas ( $H_0$  ditolak), dan sebaliknya jika F hitung  $<$  F tabel, berarti tidak ada pengaruh yang berarti secara keseluruhan dari variabel bebas terhadap variabel tidak bebas ( $H_0$  diterima).

### 3.5.3 Uji t-test

Untuk mengetahui tingkat keberartian pengaruh masing-masing koefisien regresi, dilakukan uji t atau t-test. Secara statistik rumus yang digunakan untuk menghitung nilai ini adalah sebagai berikut: (Gujarati. 1996)

$$t(\hat{\beta}) = \frac{\hat{\beta}}{\sqrt{\frac{G_n^2}{\sum x^2}}}$$

Jika t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel yang terdapat dalam table distribusi t, berarti koefisien dari garis regresi tidak sama dengan nol. Oleh karena itu hipotesis nol diterima dan hipotesis alternative ditolak berarti t-hitung lebih kecil dari t-tabel.

## 3.6 Pengujian Asumsi Klasik

Suatu model dikatakan baik untuk alat prediksi apabila mempunyai sifat-sifat tidak bias linier terbaik suatu penaksir. Disamping itu suatu model dikatakan cukup baik dan dapat dipakai untuk memprediksi apabila sudah lolos dari serangkaian uji asumsi klasik yang melandasinya. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari:

### 3.6.1 Uji Normalitas

Uji asumsi klasik yang pertama adalah uji normalitas, dilakukan untuk melihat bahwa suatu data terdistribusi dengan normal atau tidak. Uji

normalitas data dengan uji Kolmogorov-Smirnov dapat dirumuskan sebagai berikut:

Hipotesis :

$H_0$  = sampel berdistribusi normal

$H_1$  = sampel tidak berdistribusi normal

Pedoman pengambilan keputusan :

- Nilai signifikansi atau probabilitas  $< 0,05$ . Distribusi adalah tidak normal, yang berarti  $H_0$  ditolak.
- Nilai signifikansi atau probabilitas  $> 0,05$ . Distribusi adalah normal, yang berarti  $H_0$  diterima.

### 3.6.2 Uji Multikolineritas

Uji multikolineritas dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat interkorelasi yang sempurna diantara beberapa variabel bebas yang digunakan dalam persamaan regresi. Uji multikolineritas menggunakan nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel bebas menjadi variabel terikat dan diregresi terhadap variabel bebas lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena  $VIF = 1/tolerance$ ) dan menunjukkan adanya kolonieritas yang tinggi. Lebih ditegaskan oleh Ghazali bila korelasi antara dua variabel bebas melebihi 90% maka VIF-



nya diatas 10 maka dapat dikatakan bahwa model tersebut terkena multikolinieritas (Ghozali, 2001).

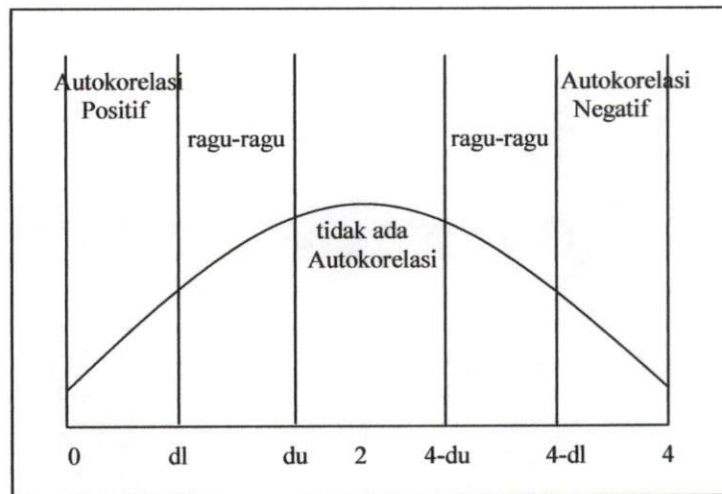
### 3.6.3 Uji heterokedastisitas

Uji ini muncul apabila kesalahan atau residual dari model yang dianalisis tidak memiliki *varian* yang konstan dari suatu observasi. Konsekuensi adanya heterokedastisitas dalam model regresi adalah estimator yang digunakan dalam penelitian ini adalah grafik *scatter plot*. Grafik *scatter plot* dideteksi dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatter plot*, jika data tidak membentuk pola tertentu maka mengindikasikan model regresi tidak terjadi heterokedastisitas. Jika variabel bebas signifikan secara statistik mempengaruhi variabel terikat, maka ada indikasi terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2001).

### 3.6.4 Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan penyimpangan model regresi klasik dengan adanya korelasi antar anggota sampel yang diurutkan berdasarkan waktu. Pengujian asumsi ini sangat penting karena autokorelasi biasanya muncul pada observasi dengan menggunakan data time series. Untuk mendiagnosis adanya autokorelasi dalam suatu model regresi dilakukan pengujian terhadap nilai Durbin-Watson (d). Pengambilan keputusan dilakukan dengan bantuan kurva Durbin-Watson dengan memasukkan nilai  $d_L$  dan  $d_U$  dari tabel DW. Berikut merupakan kurva DW dengan spesifikasi autokorelasi.

Gambar 3.1 Kurva Durbin-Watson Autokorelasi



Sumber: Dwi Prayitno 2008

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM SUMATERA BARAT**

#### **4.1 Letak Geografis**

Propinsi Sumatera Barat menurut kedudukan geografis terletak antara 0°54' Lintang Utara sampai 3°30' Lintang Selatan serta 98°36' sampai 101°53' Bujur Timur dengan luas total Wilayah sekitar 42.297,30 Km ( 4.297.300 ha), termasuk 375 buah pulau besar dan kecil.

Secara administrasi Propinsi Sumatera Barat terdiri dari 19 (Sembilan belas) Kabupaten dan Kota yaitu :

Kabupaten Padang Pariaman

Kabupaten Agam

Kabupaten Pasaman

Kabupaten Pasaman Barat

Kabupaten Limapuluh Kota

Kabupaten Sawahlunto Sijunjung

Kabupaten Dharmasraya

Kabupaten Solok

Kabupaten Solok Selatan

Kabupaten Tanah Datar

Kabupaten Pesisir Selatan

Kabupaten Kepulauan Mentawai

Kota Padang

Kota Solok

Kota Sawahlunto

Kota Payakumbuh

Kota Bukittinggi

Kota Padang Panjang

Kota Pariaman

Sedangkan luas perairan laut Propinsi Sumatera Barat diperkirakan 186.500 Km<sup>2</sup>. Panjang garis pantai Propinsi Sumatera Barat 2.420.357 Km, yang meliputi 6 (enam) Kabupaten/Kota dengan perincian panjang pantai sebagai berikut:

Pasaman Barat = 142.955 Km

Agam = 38.469 Km

Padang Pariaman & Kota Pariaman = 62.332 Km

Padang = 99.632 Km

Pesisir Selatan = 278.200 Km

Kepulauan Mentawai = 1.798.800 Km

Secara administratif, wilayah Propinsi Sumatera Barat berbatasan:

Disebelah Utara dengan Propinsi Sumatera utara

Disebelah Selatan dengan Propinsi Bengkulu

Disebelah Timur dengan Propinsi Riau & Jambi

Disebelah Barat dengan Samudera Hindia



## **4.2 Kondisi Topografi**

Menurut topografi, Propinsi Sumatera Barat dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) satuan ruang morfologi yaitu:

### **4.2.1 Morfologi Dataran**

Daerah dengan morfologi dataran terdapat pada wilayah bagian barat dengan ketinggian antara 0 s/d 50 M diatas permukaan laut, meliputi; bagian dari Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kota Padang.

### **4.2.2 Morfologi Bergelombang**

Daerah bagian tengah dengan ketinggian antara 50 – 100 M diatas permukaan laut, meliputi; bagian dari Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman Barat.

### **4.2.3 Morfologi Perbukitan**

Daerah bagian Timur dengan ketinggian antara 100 – 500 M diatas permukaan laut, meliputi: bagian dari Kota Sawahlunto, Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, Dharmasraya, Kota Bukittinggi, Kabupaten Limapuluh Kota dan Kabupaten Tanah Datar, sebagian Agam, sebahagian Pasaman, Kabu

### **4.3 Gambaran Ekonomi Sumatera Barat Tahun 2008**

Kinerja perekonomian Sumatera Barat pada tahun 2008 secara keseluruhan menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Perkembangan ini tidak terlepas dari pertumbuhan perekonomian Indonesia secara umum yang juga menunjukan hasil yang semakin membaik.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Barat menurut Lapangan Usaha atas dasar harga konstan 2000 pada tahun 2008 tercatat sebesar 35,00 triliun Rupiah. Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Lapangan Usaha berdasarkan harga berlaku adalah 70,61 triliun rupiah. Nilai PDRB tersebut lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, dimana nilai PDRB tahun 2007 berdasarkan Lapangan Usaha atas dasar harga konstan sebesar 32,91 triliun rupiah dan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Lapangan Usaha atas dasar harga berlaku sebesar 59,75 triliun rupiah.

Seperti halnya dengan tahun 2007, pada tahun 2008 seluruh sektor ekonomi yang ada mengalami pertumbuhan yang positif. Sedangkan yang merupakan kontributor terbesar terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Barat adalah sektor pertanian.

#### **4.3.1 Pertumbuhan Ekonomi**

Perhitungan pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan menggunakan PDRB atas dasar harga konstan 2000, jika perhitungan dilakukan atas dasar harga berlaku angka yang didapatkan terlalu tinggi karena di dalamnya terdapat unsur inflasi.

Tabel. 4.1: PDRB Sumatera Barat Atas Dasar Harga Konstan 2000  
(Jutaan Rupiah)

| No. | Tahun | Jumlah PDRB   |
|-----|-------|---------------|
| 1   | 1990  | 14.456.154,82 |
| 2   | 1991  | 15.369.112,02 |
| 3   | 1992  | 16.396.786,73 |
| 4   | 1993  | 17.532.170,17 |
| 5   | 1994  | 18.827.395,14 |
| 6   | 1995  | 20.520.777,77 |
| 7   | 1996  | 22.136.290,94 |
| 8   | 1997  | 23.274.058,22 |
| 9   | 1998  | 21.762.617,75 |
| 10  | 1999  | 22.053.143,66 |
| 11  | 2000  | 22.889.614,05 |
| 12  | 2001  | 23.727.373,93 |
| 13  | 2002  | 24.840.187,76 |
| 14  | 2003  | 26.146.781,63 |
| 15  | 2004  | 27.578.136,63 |
| 16  | 2005  | 29.159.480,53 |
| 17  | 2006  | 30.949.945,10 |
| 18  | 2007  | 32.912.968,59 |
| 19  | 2008  | 35.007.921,57 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan tabel. 4.1 di atas dapat kita lihat bahwa terdapat kenaikan PDRB Sumatera Barat dari tahun ketahun. PDRB pada tahun 1990 sebesar 14,45 triliun rupiah, pada tahun 1991 sebesar 15,36 triliun rupiah, pada tahun 1992 sebesar 16,39 triliun rupiah, pada tahun 1993 sebesar 17,53 triliun rupiah, pada tahun 1994 sebesar 18,82 triliun rupiah. Kemudian pada tahun 1995 jumlah PDRB atas harga konstan tahun 2000 sebesar 20,52 triliun rupiah, dan pada tahun 1996 sebesar 22,13 triliun rupiah. Selanjutnya pada tahun berikutnya yaitu tahun 1997 jumlah PDRB sebesar 23,27 triliun rupiah, tahun 1998 sebesar 21,76 triliun rupiah, tahun

1999 sebesar 22,05 triliun rupiah, dan pada tahun 2000 sebesar 22,89 triliun rupiah. Pada tahun 2001 jumlah PDRB sebesar 23,72 triliun rupiah, tahun 2002 sebesar 24,84 triliun rupiah, pada tahun 2003 sebesar 26,14 triliun rupiah. Peningkatan PDRB terus terjadi di Sumatera Barat, pada tahun 2004 jumlah PDRB atas harga konstan 2000 sebesar 27,57 triliun rupiah, pada tahun 2005 kenaikan PDRB menjadi 29,15 triliun rupiah. Pada tahun 2006 PDRB berjumlah sebesar 30,94 triliun rupiah, dan pada tahun 2007 jumlah PDRB sebesar 32,91 triliun rupiah, selanjutnya pada tahun 2008 PDRB Sumatera Barat atas harga konstan 2000 berjumlah sebesar 35,00 triliun rupiah.

Tabel 4.2 Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat (%)

| No.                   | Tahun | Pertumbuhan Ekonomi |
|-----------------------|-------|---------------------|
| 1                     | 1990  | -                   |
| 2                     | 1991  | 6.32                |
| 3                     | 1992  | 6.69                |
| 4                     | 1993  | 6.92                |
| 5                     | 1994  | 7.39                |
| 6                     | 1995  | 8.99                |
| 7                     | 1996  | 7.87                |
| 8                     | 1997  | 5.14                |
| 9                     | 1998  | -6.49               |
| 10                    | 1999  | 1.33                |
| 11                    | 2000  | 3.79                |
| 12                    | 2001  | 3.66                |
| 13                    | 2002  | 4.69                |
| 14                    | 2003  | 5.26                |
| 15                    | 2004  | 5.47                |
| 16                    | 2005  | 5.73                |
| 17                    | 2006  | 6.14                |
| 18                    | 2007  | 6.34                |
| 19                    | 2008  | 6.37                |
| Pertumbuhan rata-rata |       | 5.09                |

Sumber : Penghitungan dari tabel.4.1



Dari tabel. 4.2 di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dari tahun 1990 sampai tahun 2008 rata-rata mengalami peningkatan. Pada tahun 1991 pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sebesar 6,32 persen. Selanjutnya pada tahun 1992 sebesar 6,69 persen, pada tahun 1993 sebesar 6,92 persen. Selanjutnya pada tahun 1994 pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sebesar 7,39 persen, pada tahun 1995 sebesar 8,99 persen. Namun pada tahun 1996 sampai tahun 1998 terjadi penurunan PDRB yang diakibatkan dari terjadinya kondisi krisis moneter yang melanda perekonomian Indonesia. Tahun 1996 Sumatera Barat mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yaitu menjadi 7,87 persen, dan pada tahun 1997 pertumbuhan ekonomi menurun menjadi 5,14 persen.

Selanjutnya pada tahun 1998 terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi yang sangat tajam yaitu menjadi minus 6,49 persen. Hal ini sesuai dengan masalah krisis moneter yang melanda perekonomian di seluruh daerah di Indonesia. Akan tetapi pada tahun berikutnya yaitu tahun 1999 perekonomian mulai tumbuh kembali yaitu sebesar 1,33 persen. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat selalu mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2000 sebesar 3,79 persen, tahun 2001 sebesar 3,66 persen, tahun 2002 sebesar 4,69 persen, tahun 2003 sebesar 5,26 persen, dan tahun 2004 sebesar 5,47 persen. Selanjutnya pada tahun 2005 pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sebesar 5,73 persen, tahun 2006 sebesar 6,14 persen, tahun 2007 sebesar 6,34 persen, tahun 2007

sebesar 6,34 persen, dan selanjutnya pada tahun 2008 sebesar 6,37 persen. Sehingga dapat dikatakan trend pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun 1990-2008 cenderung meningkat dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 5,09 persen.

#### 4.3.2 Struktur Ekonomi

Secara umum, daerah Sumatera Barat masih merupakan daerah agraris. Hal ini disebabkan karena struktur ekonomi Sumatera Barat masih kuat ketergantungannya pada sektor pertanian.

Tabel. 4.3: Distribusi Persentase PDRB per sektor Sumatera Barat  
Atas Dasar Harga Berlaku (1990-2008)

| No. | Lapangan Usaha                          | 1990  | 1991  | 1992  | 1993  | 1994  | 1995  |
|-----|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1   | Pertanian                               | 31.92 | 31.14 | 29.69 | 22.3  | 21.4  | 22.65 |
| 2   | Pertambangan dan Penggalian             | 1.46  | 1.36  | 1.5   | 5.29  | 5.87  | 1.87  |
| 3   | Industri pengolahan                     | 12.12 | 12.33 | 13.11 | 14.71 | 14.55 | 15.27 |
| 4   | Listrik, Gas, dan Air bersih            | 1.26  | 1.22  | 1.16  | 0,9   | 0.96  | 1.08  |
| 5   | Bangunan                                | 3.92  | 3.89  | 3.76  | 6.15  | 6.21  | 6.5   |
| 6   | Perdagangan, Hotel, dan Restoran        | 23.99 | 24.06 | 24.17 | 17.05 | 17.53 | 16.99 |
| 7   | Pengangkutan dan Komunikasi             | 9.23  | 9.7   | 10.04 | 10.84 | 11.13 | 11.45 |
| 8   | Keuangan, Persewaan dan Jasa perusahaan | 13.27 | 13.57 | 13.83 | 6.1   | 5.85  | 5.52  |
| 9   | Jasa-Jasa                               | 2.84  | 2.73  | 2.74  | 16.57 | 16.46 | 16.12 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

(sambungan)-Tabel. 4.3: Distribusi Persentase PDRB Sumatera Barat

Atas Dasar Harga Berlaku (1990-2008)

| No. | Lapangan Usaha                          | 1996  | 1997  | 1998  | 1999  | 2000  | 2001  |
|-----|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1   | Pertanian                               | 22.5  | 20.23 | 21.69 | 23.48 | 22.78 | 23.59 |
| 2   | Pertambangan dan Penggalian             | 1.52  | 6.84  | 4.58  | 3.67  | 3.58  | 3.73  |
| 3   | Industri pengolahan                     | 15.36 | 15.01 | 13.74 | 12.9  | 13.16 | 13.7  |
| 4   | Listrik, Gas, dan Air bersih            | 1.19  | 1.42  | 1.11  | 1.17  | 1.32  | 0.99  |
| 5   | Bangunan                                | 7.15  | 7.41  | 4.9   | 4.4   | 4.59  | 4.97  |
| 6   | Perdagangan, Hotel, dan Restoran        | 16.2  | 16.1  | 18.95 | 17.91 | 18.08 | 19.05 |
| 7   | Pengangkutan dan Komunikasi             | 11.76 | 11.83 | 13.1  | 13.4  | 13.5  | 11.78 |
| 8   | Keuangan, Persewaan dan Jasa perusahaan | 5.17  | 5.06  | 5.27  | 4.89  | 4.91  | 5.11  |
| 9   | Jasa-Jasa                               | 15.81 | 16.1  | 16.67 | 18.18 | 18.07 | 17.07 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

(sambungan)-Tabel. 4.3: Distribusi Persentase PDRB Sumatera Barat

Atas Dasar Harga Berlaku (1990-2008)

| No. | Lapangan Usaha                          | 2002  | 2003  | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  |
|-----|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1   | Pertanian                               | 23.41 | 24.18 | 24.27 | 25.29 | 25.26 | 24.67 | 25.11 |
| 2   | Pertambangan dan Penggalian             | 3,73  | 3.59  | 3.52  | 3.39  | 3.45  | 3.44  | 3.47  |
| 3   | Industri pengolahan                     | 13.16 | 12.59 | 12.25 | 11.38 | 11.42 | 12.01 | 11.98 |
| 4   | Listrik, Gas, dan Air bersih            | 1.27  | 1.47  | 1.47  | 1.49  | 1.42  | 1.37  | 1.41  |
| 5   | Bangunan                                | 4.81  | 4.94  | 5.37  | 5.53  | 5.61  | 5.5   | 5.47  |
| 6   | Perdagangan, Hotel, dan Restoran        | 18.88 | 18.79 | 18.8  | 17.46 | 16.69 | 17.34 | 17.3  |
| 7   | Pengangkutan dan Komunikasi             | 12.78 | 12.59 | 12.28 | 13.81 | 15.53 | 15.07 | 15.43 |
| 8   | Keuangan, Persewaan dan Jasa perusahaan | 5.15  | 5.27  | 5.17  | 5.03  | 4.96  | 4.96  | 4.82  |
| 9   | Jasa-Jasa                               | 16.81 | 16.57 | 16.87 | 16.31 | 15.79 | 15.64 | 15.86 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan table.4.3 di atas dapat dilihat bahwa kontribusi terbesar terhadap PDRB berasal dari sektor pertanian. Walaupun laju pertumbuhan sektor pertanian dari tahun ketahun berfluktuatif, akan tetapi

sampai tahun 2007 sektor pertanian tetap merupakan sektor yang mempunyai peranan penting di Sumatera Barat.

Hal ini terlihat pada tahun 1990 kontribusi sektor pertanian sebesar 31,92 persen, pada tahun 1991 sebesar 31,14 persen, pada tahun 1992 sebesar 29,69 persen, pada tahun 1993 sebesar 22,3 persen, pada tahun 1994 sebesar 21,4 persen. Pada tahun 1995 terjadi kenaikan menjadi 22,65 persen. Namun pada tahun 1996 terjadi penurunan menjadi 22,5 persen, pada tahun 1997 sebesar 20,23 persen, tahun 1998 kenaikan terjadi kembali yaitu menjadi sebesar 21,69 persen, pada tahun berikutnya 1999 sektor pertanian mengalami kenaikan kembali menjadi 23,48 persen. Pada tahun 2000 sebesar 22,78 persen, pada tahun 2001 sebesar 23,59 persen. Kemudian pada tahun 2002 sektor pertanian sebesar 23,41 persen, pada tahun 2003 sebesar 24,18 persen, pada tahun 2004 sebesar 24,27 persen, tahun 2005 sebesar 25,29 persen, pada tahun 2006 sebesar 25,26 persen. Kemudian pada tahun 2007 dan 2008 sektor pertanian sebesar 24,67 persen dan 24,51.

Sektor berikutnya yang juga mempunyai andil yang juga besar dalam pembentukan PDRB Sumatera Barat adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Suku Minang yang merupakan etnis mayoritas di provinsi Sumatera Barat selama ini dikenal sebagai saudagar yang tangguh, baik di dalam maupun di luar provinsi Sumatera Barat. Dan hasilnya terlihat dari cukup besarnya kontribusi sektor perdagangan, hotel



dan restoran dalam pembentukan PDRB Sumatera Barat. Hal ini dapat dilihat pada tabel. 4.3, kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran terbesar terjadi pada tahun 1992 yaitu sebesar 24.72 persen.

Berbeda dengan kondisi di Indonesia secara umum, sektor industri pengolahan nampaknya belum memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian Sumatera Barat. Pada tahun 2007 sektor ini hanya menyumbangkan 12,01 persen dan pada tahun 2008 sebesar 11,98 persen terhadap PDRB Sumatera Barat. Akan tetapi, jika dibanding tahun 2006 telah terjadi peningkatan dimana peranan sektor tersebut di tahun 1999 baru mencapai 12,12 persen.

Kontribusi sektor industri pengolahan ini juga lebih baik dibanding beberapa sektor lainnya, seperti sektor listrik, gas dan air bersih yang merupakan paling kecil peranannya dalam pembentukan PDRB Sumatera Barat. Pada tahun 2008 tercatat kontribusi dari sektor listrik, gas dan air bersih adalah sebesar 1,41 persen.

#### **4.4 Gambaran Investasi Sumatera Barat**

Investasi merupakan salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Perkembangan investasi di Sumatera Barat selama periode 1990-2008 atas dasar harga konstan secara rata-rata mengalami peningkatan tiap tahunnya.

Table 4.4 Nilai Investasi Sumatera Barat 1990-2008  
(Rp Milyar)

| No. | Tahun | Atas Dasar               |
|-----|-------|--------------------------|
|     |       | Harga Konstan Tahun 2000 |
| 1   | 1990  | 3748.57                  |
| 2   | 1991  | 3783.12                  |
| 3   | 1992  | 4263.08                  |
| 4   | 1993  | 4921.25                  |
| 5   | 1994  | 5607.13                  |
| 6   | 1995  | 6425.53                  |
| 7   | 1996  | 6465.17                  |
| 8   | 1997  | 6362.77                  |
| 9   | 1998  | 5466.35                  |
| 10  | 1999  | 4402.08                  |
| 11  | 2000  | 4794.67                  |
| 12  | 2001  | 4970.40                  |
| 13  | 2002  | 5.678,52                 |
| 14  | 2003  | 6.165,72                 |
| 15  | 2004  | 6.752,58                 |
| 16  | 2005  | 8.053,49                 |
| 17  | 2006  | 9.408,08                 |
| 18  | 2007  | 10.453,66                |
| 19  | 2008  | 12.514,20                |

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Dari tabel 4.4 diatas dapat dilihat bahwa investasi tertinggi terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 12,51 triliun rupiah. Pada tahun 1990 investasi sebesar 3,74 triliun rupiah, pada tahun 1991 sebesar 3,78 triliun rupiah, tahun 1992 sebesar 4,26 triliun rupiah, dan pada tahun 1993 sebesar 4,92 triliun rupiah. Kenaikan investasi terus terjadi sampai pada tahun 1996, yaitu sebesar 4,46 triliun rupiah. Selanjutnya pada era krisis moneter yang melanda perekonomian Indonesia, ekonomi di Sumatera Barat juga merasakan dampaknya yaitu menurunnya investasi menjadi 5,46 triliun rupiah dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 6.36 trilun rupiah. Pada tahun 2000 perekonomian mulai tumbuh, di sertai dengan bertumbuhnya investasi di Sumatera Barat yaitu sebesar 4,79 triliun rupiah, tahun 2001 sebesar 4,97 triliun rupiah, tahun 2002 sebesar 5.6 triliun rupiah dan mengalami peningkatan terus sampai tahun 2008 yaitu sebesar 12,51 triliun rupiah.

#### **4.5 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Sumatera Barat**

Pengeluaran pemerintah daerah Sumatera Barat berfluktuasi namun pada umumnya mengalami kenaikan. Besar kecilnya pengeluaran ini sangat dipengaruhi atau sangat tergantung pada besarnya penerimaan. Makin besar penerimaan maka pengeluaran akan semakin besar pula.

Tabel 4.5 Belanja Daerah Sumatera Barat

Tahun 1990-2008

(000 rupiah)

| No. | Tahun | Belanja (Expenditure) |
|-----|-------|-----------------------|
| 1   | 1990  | 170.761.970           |
| 2   | 1991  | 195.985.008           |
| 3   | 1992  | 291.58.,664           |
| 4   | 1993  | 341.417.238           |
| 5   | 1994  | 367.163.836           |
| 6   | 1995  | 413.786.391           |
| 7   | 1996  | 466.831.327           |
| 8   | 1997  | 491.915.982           |
| 9   | 1998  | 587.978.266           |
| 10  | 1999  | 790.340.536           |
| 11  | 2000  | 832.500.305           |
| 12  | 2001  | 1.838.847.937         |
| 13  | 2002  | 2.625.628.433         |
| 14  | 2003  | 3.080.259.578         |
| 15  | 2004  | 3.609.769.509         |
| 16  | 2005  | 745.548.636           |
| 17  | 2006  | 960.089.657           |
| 18  | 2007  | 1.241.375.383         |
| 19  | 2008  | 1.637.700.489         |

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat



Pada table 4.5 diatas dapat dilihat bahwa tahun 1990 sampai tahun 2004 belanja daerah Sumatera Barat mengalami peningkatan. Tahun 1990 belanja daerah sebesar 170 milyar rupiah, tahun 1991 sebesar 195 miliar rupiah, tahun 1992 sebesar 291 miliar rupiah. Tahun 1993 belanja daerah Sumatera Barat sebesar 341 milyar rupiah, tahun 1994 sebesar 367 milyar rupiah, dan pada tahun 1995 sebesar 413 milyar rupiah. Tahun 1996 dan 1997 belanja daerah sebesar 466 milyar rupiah dan 491 milyar rupiah. pada tahun 1998 belanja sebesar 587 milyar rupiah, tahun 1999 sebesar 790 milyar rupiah. Pada tahun 2001 terjadi peningkatan belanja daerah yang sangat tajam yaitu sebesar 1.83 triliun rupiah dibandingkan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2000 yang hanya sebesar 832 Miliar rupiah.

Diikuti dengan tahun berikutnya yaitu tahun 2002 belanja daerah sebesar 2,62 triliun rupiah, tahun 2003 sebesar 3,08 triliun rupiah dan tahun 2004 sebesar 3,6 triliun rupiah. namun pada tahun 2005 terjadi penurunan belanja yang drastic menjadi sebesar 745 milyar rupiah. sebaliknya pada tahun 2006 belanja daerah meningkat kembali yaitu sebesar 960 milyar rupiah. pada tahun 2007 dan tahun 2008 belanja daerah terus mengalami peningkatan yaitu masing –masing sebesar 1,24 triliun rupiah dan 1,63 triliun rupiah.

#### **4.6 Gambaran Pengangguran Sumatera Barat**

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah suatu besaran yang merupakan persentase dari jumlah pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja.

Tabel 4.6 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tahun 1990-2008

| No. | Tahun | Jumlah Pengangguran<br>Terbuka | Tingkat Pengangguran Terbuka<br>(%) |
|-----|-------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1   | 1990  | 52273                          | 1,93                                |
| 2   | 1991  | 66846                          | 2,14                                |
| 3   | 1992  | 81418                          | 2,56                                |
| 4   | 1993  | 76329                          | 2,4                                 |
| 5   | 1994  | 90643                          | 5,73                                |
| 6   | 1995  | 134400                         | 7,46                                |
| 7   | 1996  | 178428                         | 4,11                                |
| 8   | 1997  | 184659                         | 4,2                                 |
| 9   | 1998  | 252291                         | 5,64                                |
| 10  | 1999  | 263889                         | 5,81                                |
| 11  | 2000  | 246437                         | 5,81                                |
| 12  | 2001  | 64725                          | 3,74                                |
| 13  | 2002  | 105987                         | 5,98                                |
| 14  | 2003  | 245605                         | 12,56                               |
| 15  | 2004  | 258224                         | 12,74                               |
| 16  | 2005  | 264307                         | 13,34                               |
| 17  | 2006  | 243525                         | 11,87                               |
| 18  | 2007  | 217305                         | 10,31                               |
| 19  | 2008  | 171134                         | 8,04                                |

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Dari tabel 4.6 memperlihatkan bahwa jumlah pengangguran di Sumatera Barat dari tahun 1990 sampai tahun 2008 secara rata-rata mengalami peningkatan. Akan tetapi tingkat persentase pertumbuhan penganggurannya mengalami fluktuasi. Pada tahun 1990 jumlah pengangguran terbuka sebesar 52.273 jiwa atau 1,93% dari angkatan kerja pada tahun tersebut. Selanjutnya pada tahun 1992 pengangguran makin bertambah menjadi sebesar 66.846 jiwa dengan tingkat pertumbuhan pengangguran terbuka sebesar 2,14%. Pada tahun 1993 jumlah jumlah pengangguran terbuka menurun menjadi 76.329 jiwa dgn

pertumbuhan TPTnya sebesar 2,4%. Pada tahun 1994 sampai tahun 2000 jumlah pengangguran terbuka terus meningkat, yaitu tahun 1994 sebesar 90.643 jiwa, tahun 1995 sebesar 134.400 jiwa, tahun 1996 sebesar 178.428 jiwa, tahun 1997 sebesar 184.659 jiwa, tahun 1998 sebesar 263.889 jiwa, tahun 1999 sebesar 263.889 jiwa dan pada tahun 2000 sebesar 246.437 jiwa. Selanjutnya pada tahun 2001 jumlah pengangguran terbuka di Sumatera Barat dapat ditekan, menjadi sebesar 64.725 jiwa dengan pertumbuhan TPTnya 3,74%. Namun pada tahun 2002 sampai tahun 2005 terjadi kembali peningkatan jumlah pengangguran terbuka, yaitu pada tahun 2002 sebesar 105.987 jiwa dengan pertumbuhan TPT sebesar 5,98%, tahun 2003 sebesar 245.605 jiwa dengan pertumbuhan TPT sebesar 12,56%, pada tahun 2004 sebesar 258.224 jiwa dengan pertumbuhan TPT sebesar 12,74% dan pada tahun 2005 sebesar 264.307 jiwa dengan pertumbuhan TPT sebesar 13,34%. Selanjutnya pada tahun 2006 sampai tahun 2008 jumlah pengangguran berangsur-angsur dapat dikurangi, yaitu pada tahun 2006 sebesar 243.525 jiwa dengan pertumbuhan TPT sebesar 11,87%, tahun 2007 sebesar 217.305 jiwa dengan pertumbuhan TPT sebesar 10,31% dan pada tahun 2008 jumlah pengangguran terbuka sebesar 171.134 jiwa dengan pertumbuhan TPT sebesar 8,04% dari angkatan kerja pada tahun tersebut.

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **5.1 Penemuan Empiris**

Seperti yang telah dituliskan pada BAB III bahwa dalam penelitian ini digunakan analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independent dengan variabel dependen. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independent dengan variabel dependen, apakah masing-masing berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independent mengalami kenaikan atau penurunan.

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, diperoleh nilai  $R^2$  sebesar 0,963 dari hasil estimasi yang dilakukan. Ini berarti variabel independent (Investasi, APBD, dan Pengangguran) sebesar 96,3% dapat menjelaskan variabel dependent (PDRB), dan ada variabel-variabel lain yang dapat menjelaskan variabel dependent (PDRB) ini sebesar 3,7%. Maka dapat diketahui bahwa variabel independent dapat mempengaruhi variabel dependent sebesar 96,3%. Besarnya persentase ini memperlihatkan bahwa persamaan regresi yang digunakan sangat baik untuk melakukan estimasi variabel dependent.



Sedangkan untuk menguji bagaimana pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen, maka dilakukan pengujian melalui F hitung dan t-hitung,, serta uji keeratan hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Dari hasil pengujian, nilai F hitung yang diperoleh adalah sebesar 128,616 dan F tabel adalah sebesar 3,287 pada taraf signifikan 5%. Berarti nilai F hitung lebih besar dari F tabel yang selanjutnya mengindikasikan Investasi, APBD dan Pengangguran mampu menjelaskan PDRB pada tingkat kepercayaan 95%.

Hasil regresi dari faktor-faktor yang mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 5.1**  
**Hasil Regresi Linear Berganda**

| Dependent Variabel: LnPDRB |             |                    |             |         |
|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|---------|
| Variabel                   | Coefficient | Std.Error          | t-statistic | Sig     |
| C                          | 9.844       | 0.362              | 27.224      | 0.000   |
| LnInvestasi                | 0.451       | 0.048              | 9.42        | 0.000   |
| LnAPBD                     | 0.108       | 0.017              | 6.343       | 0.000   |
| LnPengangguran             | 0.082       | 0.028              | 2.941       | 0.010   |
| R-Squared                  | 0.963       | mean dependent var |             | 16.9419 |
| Adjusted R-Squared         | 0.955       | S.D dependent var  |             | 0.25051 |
| S.E of Estimate            | 0.053       | F statistic        |             | 128.616 |
| Sum squared resid          | 0.042       | Sig (F-statistic)  |             | 0.000   |
| Durbin-Watson Stat         | 1.26        |                    |             |         |
| Sumber: data diolah        |             |                    |             |         |

Hasil estimasi yang telah diperoleh adalah sebagai berikut:

$$\begin{array}{lcl} \text{LnY} & = & 9,844 + 0,451 \text{ LnX1} + 0,108 \text{ LnX2} + 0,082 \text{ LnX3} \\ \text{t- hitung} & & (27,224) \quad (9,420) \quad (6,343) \quad (2,941) \end{array}$$

Dari hasil estimasi yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa Investasi memiliki hubungan yang signifikan dan positif dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Sumatera Barat. Hal ini terlihat dari nilai t hitung yang diperoleh secara empiris yaitu sebesar 9,42. Jika nilai t hitung ini dibandingkan dengan t tabel pada tingkat kepercayaan 95%, maka nilai t hitung memiliki nilai lebih besar dibandingkan t tabel yaitu sebesar 2,131. Ini berarti peningkatan Investasi akan meningkatkan PDRB di Sumatera Barat, dimana kenaikan 1% akan meningkatkan PDRB sebesar 45,1%.

Untuk variabel independen APBD, terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara APBD dengan PDRB di Sumatera Barat, dengan nilai t hitung sebesar 6,343 yang lebih besar dari t tabel sebesar 2,131 dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Dimana kenaikan Belanja Daerah (APBD) sebesar 1% akan menaikkan PDRB sebesar 10,8%.

Variabel independen pengangguran, terdapat hubungan positif atau searah antara pengangguran dengan PDRB di Sumatera Barat, dimana t hitung sebesar 2,941 lebih besar jika dibandingkan dengan t tabel yaitu sebesar 2,131 dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Dimana kenaikan pengangguran sebesar 1% akan menaikkan PDRB sebesar 8,2%. Berdasarkan teori Lewis, Terjadinya hubungan yang searah atau positif antara pengangguran dengan

PDRB disebabkan karena semakin tingginya pengangguran akan membuat penurunan upah tenaga kerja. Oleh karena itu, dengan rendahnya tingkat upah yang dikeluarkan, maka akan membuat para kapitalis akan menanamkan modal (investasi) sebesar-besarnya. Dengan tingginya penanaman modal (investasi) akan meningkatkan PDRB di Sumatera Barat.

## **5.2 Pengujian Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik dimaksudkan untuk menilai data apakah layak atau tidak untuk diuji dan dianalisis. Uji asumsi yang dilakukan yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

### **A. Uji Normalitas**

Uji normalitas, dilakukan untuk melihat bahwa suatu data terdistribusi dengan normal atau tidak. Berdasarkan pengolahan data terhadap uji normalitas, hasil dari Kolmogorov-Smirnov untuk variabel dependen mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,200 atau  $> 0,05$ . Maka  $H_0$  diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

### **B. Uji Multikolinearitas**

Suatu model regresi dikatakan bebas dari multikolinieritas, jika:

- Mempunyai VIF disekitar angka 1
- Mempunyai angka tolerance mendekati 1

Dimana :  $\text{tolerance} = 1/\text{VIF}$  atau bisa juga  $\text{VIF} = 1/\text{tolerance}$ .

Dari hasil regresi diperoleh nilai VIF berada di sekitar angka 1. Hal ini berarti model yang digunakan terbebas dari gejala multikolinearitas.

### **C. Uji Heteroskedastisitas**

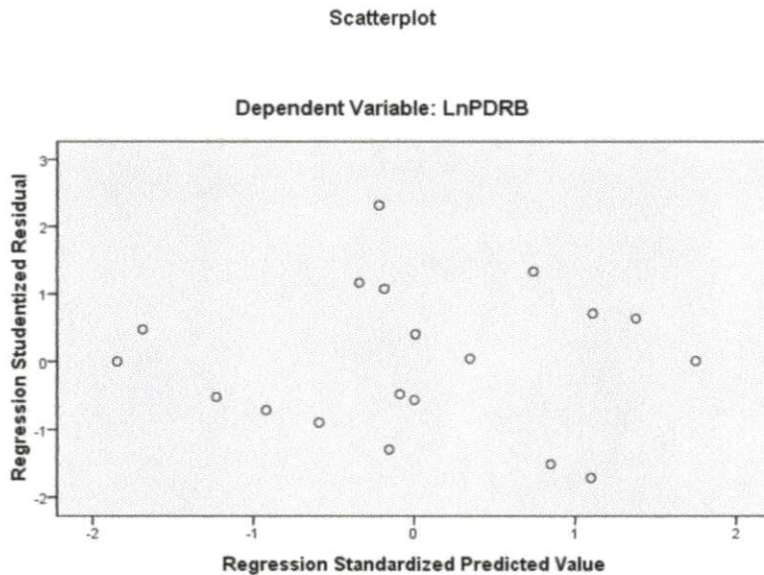
Dasar analisisnya adalah :

- Jika ada pola tertentu seperti titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, menyebar, dan menyempit) maka mengidentifikasi telah terjadi heteroskedastisitas.
- Jika tidak ada pola tertentu atau seperti titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, menyebar, dan menyempit) maka mengidentifikasi tidak terjadi heteroskedastisitas.

Pada grafik scatter plot dapat dilihat bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas dikarenakan tidak membentuk pola dan titik-titik menyebar secara acak.



**Gambar 5.1 Uji Heteroskedastisitas**



Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 16.00

#### **D. Uji Autokorelasi**

Dalam pengujian autokorelasi, hasil regresi menunjukkan nilai  $d$  sebesar 1,260 sedangkan nilai  $d_l$  dan  $d_u$  yang diperoleh dari tabel Durbin-Watson memiliki nilai sebesar 0,967 dan 1,685. Dengan bantuan kurva Durbin-Watson, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi penelitian berada pada nilai ragu-ragu dalam autokorelasi, dimana terjadinya masalah dalam autokorelasi dapat ditiadakan atau tidak dapat disimpulkan.

### **5.3 Implikasi Kebijakan**

Dari hasil penemuan empiris yang telah dijelaskan di atas, dapat diimplikasikan bahwa selama periode analisis yaitu dari tahun 1990 sampai 2008 terdapat hubungan yang searah dan signifikan antara Investasi, APBD,

dan Pengangguran terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Sumatera Barat.

Besarnya Investasi yang ditanamkan di Sumatera Barat disebabkan karena iklim investasi yang cukup menarik di daerah Sumatera Barat. Faktor penyebab besarnya nilai investasi di Sumatera Barat disebabkan oleh masih sedikitnya persaingan industri kecil ataupun industri berskala besar sejak tahun 1990 sampai tahun 2008 di Propinsi Sumatera Barat. Hal ini membuat para investor berani dan yakin untuk berinvestasi dan mengharapkan laba yang cukup besar di Sumatera Barat. Oleh karena itu, jika investasi semakin tumbuh maka akan mendorong peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan titik acuan pertumbuhan ekonomi di Indonesia khususnya Sumatera Barat.

Dari sisi belanja daerah (APBD), terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi karena biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk belanjanya, akan terdistribusi kepada produsen di wilayah Sumatera Barat. Hal ini sesuai dengan teori klasik yang mengatakan semakin besar pengeluaran pemerintah, maka akan meningkatkan jumlah output di suatu Negara atau wilayah. Biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk kebutuhannya akan mendorong jumlah produksi, maka produksi yang semakin meningkat akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.

Dilihat dari sisi pengangguran, terjadi hubungan yang searah antara pengangguran dan PDRB di Sumatera Barat. Sesuai dengan penelitian Yuan

Acitra (2009) yang berjudul pertumbuhan ekonomi dan pengangguran di Indonesia, dimana hal ini bertolak belakang dengan teori pengangguran, yaitu pengangguran yang tinggi semestinya menurunkan PDRB. Situasi ini terjadi berlandaskan kepada teori Lewis mengenai upah tenaga kerja, yaitu jika tenaga kerja berlimpah atau berlebih maka akan membuat penurunan upah tenaga kerja. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya penganggur yang ingin mendapatkan pekerjaan walaupun di bayar dengan upah minimum. Di daerah Sumatera Barat dimana tenaga kerja yang melimpah atau pengangguran yang tinggi, akan membuat upah menjadi rendah. Situasi ini akan dimanfaatkan oleh para kapitalis dengan cara menanamkan modal (investasi) sebesar-besarnya untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi. Investasi yang meningkat akan diiringi dengan peningkatan PDRB. Oleh karena itu peningkatan pengangguran menjadi searah dengan kenaikan PDRB di Sumatera Barat, asalkan diimbangi dengan investasi yang tinggi juga.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

- a. Perkembangan penerimaan PDRB di provinsi Sumatera Barat dari tahun 1990 sampai tahun 2008 mengalami trend yang meningkat. Meskipun terjadi penurunan PDRB di tahun 1998 yang disebabkan oleh krisis moneter yang melanda perekonomian di Indonesia.
- b. Peningkatan ekonomi di Sumatera Barat dari tahun 1990 sampai tahun 2008 di dominasi oleh sektor pertanian.
- c. Berdasarkan penemuan empiris terlihat bahwa 96,3 persen PDRB Sumatera Barat dipengaruhi oleh investasi, APBD dan Pengangguran, hal ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini.
- d. Investasi berpengaruh positif terhadap PDRB. Dalam hal ini investasi merupakan faktor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB di Sumatera Barat. Hal ini sesuai dengan teori dan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini.
- e. Anggaran pengeluaran daerah Sumatera Barat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Jika anggaran belanja daerah Sumatera Barat tinggi maka PDRB juga akan meningkat. Hal ini sesuai dengan teori dan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini.
- f. Pengangguran berpengaruh positif terhadap PDRB di Sumatera Barat. Hal ini bertolak belakang dengan teori yang mengatakan bahwa pengangguran



berpengaruh negative terhadap PDRB. Dengan mengacu kepada teori penawaran tenaga kerja tak terbatas (berlimpah) oleh Lewis, dinyatakan bahwa tingginya atau meningkatnya jumlah penganggur (tenaga kerja yang mencari kerja) akan berdampak pada upah yang turun atau rendah. Situasi ini akan membuat para kapitalis memperbesar investasinya (penanaman modal) guna mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan hasil penemuan empiris dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah diharapkan mampu mencari sumber-sumber lain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.
- b. Sebaiknya pemerintah daerah memberlakukan upah minimum regional, agar pengangguran tidak menerima pekerjaan yang upahnya di bawah upah minimum regional (UMR), sehingga angkatan kerja akan bersaing untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan akan meningkatkan output di daerah Sumatera Barat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Acitra, Yuan. 2009. *Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran di Indonesia*. Skripsi : Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Sumatera Barat, Padang.
- Agustina, Vita. 2006. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Kota Medan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Medan*. Skripsi : Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Algifari. 2000. *Analisis Regresi Teori, Kasus dan Solusi*, Edisi 2. BPFE, Jakarta.
- Arsyad, Lincolyn. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi 4. STIE YKPN, Jakarta.
- Arpaia, Alfonso dan Turrini, Alessandro. 2008. *Government Expenditure and Economic Growth in the EU: Long-run Tendencies and Short-term Adjustment* paper pada Economic and Financial Affairs European Commission. Belgium.
- Athukorala, Wasantha, P.P.A. 2003. *The Impact of Foreign Direct Investment for Economic Growth: A Case Study in Sri Lanka*, paper pada Department of Economics university of Peradeniya, Sri Lanka.
- Azwar, Saifudin. 2001. *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. 1990-2008. *Sumatera Barat dalam Angka*.
- Badan Pusat Statistik. 1990-2008. *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah*.
- Badan Pusat Statistik. 1990-2008. *Keadaan Tenaga Kerja Sumatera Barat*.
- Badan Pusat Statistik. 1990-2008. *Nilai Investasi Sumatera Barat*.
- Boediono. 1998. *Teori Pertumbuhan ekonomi*. BPFE, Yogyakarta.
- Boldea, Monica, Otil, Maria dan Parean, Mihai. 2009. *Analysis of the Effects of Unemployment in Romania*, paper pada Faculty of Economics and Business Administration West University of Timisoara Romania.

- Brauninger, Michael, dan Pannenberg, Markus. 2000. *Unemployment and Productivity Growth An empirical Analysis within the Augmented Solow Model*, paper pada Universitas der Bundeswehr Hamburg dan DIW Berlin und IZA at Bonn.
- Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Erlangga, Jakarta.
- Ghozali, Imam. 2001. *Aplikasi Analisis Multifariat dengan Program SPSS*. Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Graham, M. Edward dan Wada Erika. 2001. *Foreign Direct Investment in China: Effects on Growth and Economic Performance*, paper University Press, Oxford.
- Gujarati, D. 1996. *Ekonometrika Dasar*. Edisi VI. Erlangga, Jakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P. 1987. *Ekonomi Pembangunan dan Perekonomian Indonesia*. Armico, Bandung.
- Heliana. 2010. *Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Propinsi Bengkulu*. Skripsi: Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu.
- Jhingan, M. L. 1983. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Raja Grafindo, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Erlangga, Jakarta.
- Makmum dan Akhmad Yasin. 2003. *Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap PDB Sektor Pertanian*. Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol. 7, No. 3 September. BPFE, Yogyakarta.
- Mankiw, N. Gregory. 2003. *Teori Makroekonomi*, Edisi Kelima. Erlangga, Jakarta.
- Mankiw, N. Gregory. 2006. *Teori Makroekonomi*. Edisi Keenam. Erlangga, Jakarta.

- Nazara, Suahasil. 1994. *Pertumbuhan Ekonomi Regional Indonesia*. Prisma No.8. LP3ES, Jakarta.
- Nining. 1994. *Peranan APBD dalam Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara*. Skripsi: Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Nurudeen, Abu dan Usman, Abdullahi. 2010. *Government Expenditure and Economic Growth in Nigeria, 1970-2008: A Disaggregated Analysis*, paper pada Department of Economics University of Abuja PMB 117 at Nigeria.
- Saez, P. Marta dan Garcia, A. Santiago. 2002. *Government Spending and Economic Growth in the European Union Countries: An Empirical Approach*, paper pada Department of Economics University of Cantabria.
- Samuelson, Paul A. Dan Nordhaus William D. 1995. *Ekonomi (Edisi Terjemahan)*. Edisi 12 jilid 2. Erlangga, Jakarta.
- Sanusi, Bachrawi. 1987. *Pembangunan Daerah dilihat dari Potensi Energi*. LPFE UI, Jakarta.
- Sanusi, Bachrawi. 2004. *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sitompul, L, Novita. 2007. *Analisis Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja terhadap PDRB Sumatera Barat*. Skripsi: Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Padang.
- Sukirno, Sadono. 1994. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Edisi 2. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suparmoko, M. 2002. *Ekonomika Pembangunan*. BPFE, Jakarta.



Suryana, 2000, *Ekonomi Pembangunan*. Salemba 4, Jakarta.

Zaris, Roeslan. 1987. *Prespektif Daerah dalam Pembangunan Nasional*. LPFE  
UI, Jakarta.

**Lampiran 1. Data PDRB Sumatera Barat Atas Dasar Harga Konstan  
Tahun 2000**

PDRB Sumatera Barat Atas Dasar Harga Konstan 2000

(Jutaan Rupiah)

| No. | Tahun | Jumlah PDRB   |
|-----|-------|---------------|
| 1   | 1990  | 14.456.154,82 |
| 2   | 1991  | 15.369.112,02 |
| 3   | 1992  | 16.396.786,73 |
| 4   | 1993  | 17.532.170,17 |
| 5   | 1994  | 18.827.395,14 |
| 6   | 1995  | 20.520.777,77 |
| 7   | 1996  | 22.136.290,94 |
| 8   | 1997  | 23.274.058,22 |
| 9   | 1998  | 21.762.617,75 |
| 10  | 1999  | 22.053.143,66 |
| 11  | 2000  | 22.889.614,05 |
| 12  | 2001  | 23.727.373,93 |
| 13  | 2002  | 24.840.187,76 |
| 14  | 2003  | 26.146.781,63 |
| 15  | 2004  | 27.578.136,63 |
| 16  | 2005  | 29.159.480,53 |
| 17  | 2006  | 30.949.945,10 |
| 18  | 2007  | 32.912.968,59 |
| 19  | 2008  | 35.007.921,57 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

## Lampiran 2. Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat (%)

### Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat (%)

| No.                   | Tahun | Pertumbuhan Ekonomi |
|-----------------------|-------|---------------------|
| 1                     | 1990  | -                   |
| 2                     | 1991  | 6.32                |
| 3                     | 1992  | 6.69                |
| 4                     | 1993  | 6.92                |
| 5                     | 1994  | 7.39                |
| 6                     | 1995  | 8.99                |
| 7                     | 1996  | 7.87                |
| 8                     | 1997  | 5.14                |
| 19                    | 1998  | -6.49               |
| 10                    | 1999  | 1.33                |
| 11                    | 2000  | 3.79                |
| 12                    | 2001  | 3.66                |
| 13                    | 2002  | 4.69                |
| 14                    | 2003  | 5.26                |
| 15                    | 2004  | 5.47                |
| 16                    | 2005  | 5.73                |
| 17                    | 2006  | 6.14                |
| 18                    | 2007  | 6.34                |
| 19                    | 2008  | 6.37                |
| Pertumbuhan rata-rata |       | 5.09                |

Sumber : Penghitungan dari tabel.4.1

### Lampiran 3. Distribusi Persentase PDRB per sektor Sumatera Barat Atas Dasar Harga Berlaku

| No. | Lapangan Usaha                          | 1990  | 1991  | 1992  | 1993  | 1994  | 1995  | 1996  | 1997  | 1998  | 1999  | 2000  | 2001  | 2002  | 2003  | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  |
|-----|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1   | Pertanian                               | 31.92 | 31.14 | 29.69 | 22.3  | 21.4  | 22.65 | 22.5  | 20.23 | 21.69 | 23.48 | 22.78 | 23.59 | 23.41 | 24.18 | 24.27 | 25.29 | 25.26 | 24.67 | 25.11 |
| 2   | Pertambangan dan Penggalian             | 1.46  | 1.36  | 1.5   | 5.29  | 5.87  | 1.87  | 1.52  | 6.84  | 4.58  | 3.67  | 3.58  | 3.73  | 3,73  | 3.59  | 3.52  | 3.39  | 3.45  | 3.44  | 3.47  |
| 3   | Industri pengolahan                     | 12.12 | 12.33 | 13.11 | 14.71 | 14.55 | 15.27 | 15.36 | 15.01 | 13.74 | 12.9  | 13.16 | 13.7  | 13.16 | 12.59 | 12.25 | 11.38 | 11.42 | 12.01 | 11.98 |
| 4   | Listrik, Gas, dan Air bersih            | 1.26  | 1.22  | 1.16  | 0,9   | 0.96  | 1.08  | 1.19  | 1.42  | 1.11  | 1.17  | 1.32  | 0.99  | 1.27  | 1.47  | 1.47  | 1.49  | 1.42  | 1.37  | 1.41  |
| 5   | Bangunan                                | 3.92  | 3.89  | 3.76  | 6.15  | 6.21  | 6.5   | 7.15  | 7.41  | 4.9   | 4.4   | 4.59  | 4.97  | 4.81  | 4.94  | 5.37  | 5.53  | 5.61  | 5.5   | 5.47  |
| 6   | Perdagangan, Hotel, dan Restoran        | 23.99 | 24.06 | 24.17 | 17.05 | 17.53 | 16.99 | 16.2  | 16.1  | 18.95 | 17.91 | 18.08 | 19.05 | 18.88 | 18.79 | 18.8  | 17.46 | 16.69 | 17.34 | 17.3  |
| 7   | Pengangkutan dan Komunikasi             | 9.23  | 9.7   | 10.04 | 10.84 | 11.13 | 11.45 | 11.76 | 11.83 | 13.1  | 13.4  | 13.5  | 11.78 | 12.78 | 12.59 | 12.28 | 13.81 | 15.53 | 15.07 | 15.43 |
| 8   | Keuangan, Persewaan dan Jasa perusahaan | 13.27 | 13.57 | 13.83 | 6.1   | 5.85  | 5.52  | 5.17  | 5.06  | 5.27  | 4.89  | 4.91  | 5.11  | 5.15  | 5.27  | 5.17  | 5.03  | 4.96  | 4.96  | 4.82  |
| 9   | Jasa-Jasa                               | 2.84  | 2.73  | 2.74  | 16.57 | 16.46 | 16.12 | 15.81 | 16.1  | 16.67 | 18.18 | 18.07 | 17.07 | 16.81 | 16.57 | 16.87 | 16.31 | 15.79 | 15.64 | 15.86 |



#### Lampiran 4. Nilai Investasi Sumatera Barat 1990-2008

Nilai Investasi Sumatera Barat 1990-2008

(Rp Milyar)

| No. | Tahun | Atas Dasar               |
|-----|-------|--------------------------|
|     |       | Harga Konstan Tahun 2000 |
| 1   | 1990  | 3748.57                  |
| 2   | 1991  | 3783.12                  |
| 3   | 1992  | 4263.08                  |
| 4   | 1993  | 4921.25                  |
| 5   | 1994  | 5607.13                  |
| 6   | 1995  | 6425.53                  |
| 7   | 1996  | 6465.17                  |
| 8   | 1997  | 6362.77                  |
| 9   | 1998  | 5466.35                  |
| 10  | 1999  | 4402.08                  |
| 11  | 2000  | 4794.67                  |
| 12  | 2001  | 4970.40                  |
| 13  | 2002  | 5.678,52                 |
| 14  | 2003  | 6.165,72                 |
| 15  | 2004  | 6.752,58                 |
| 16  | 2005  | 8.053,49                 |
| 17  | 2006  | 9.408,08                 |
| 18  | 2007  | 10.453,66                |
| 19  | 2008  | 12.514,20                |

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

## Lampiran 5. Belanja Daerah Sumatera Barat Tahun 1990-2008

Belanja Daerah Sumatera Barat

Tahun 1990-2008

(000 rupiah)

| No. | Tahun | Belanja (Expenditure) |
|-----|-------|-----------------------|
| 1   | 1990  | 170.761.970           |
| 2   | 1991  | 195.985.008           |
| 3   | 1992  | 291.58.664            |
| 4   | 1993  | 341.417.238           |
| 5   | 1994  | 367.163.836           |
| 6   | 1995  | 413.786.391           |
| 7   | 1996  | 466.831.327           |
| 8   | 1997  | 491.915.982           |
| 9   | 1998  | 587.978.266           |
| 10  | 1999  | 790.340.536           |
| 11  | 2000  | 832.500.305           |
| 12  | 2001  | 1.838.847.937         |
| 13  | 2002  | 2.625.628.433         |
| 14  | 2003  | 3.080.259.578         |
| 15  | 2004  | 3.609.769.509         |
| 16  | 2005  | 745.548.636           |
| 17  | 2006  | 960.089.657           |
| 18  | 2007  | 1.241.375.383         |
| 19  | 2008  | 1.637.700.489         |

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

## Lampiran 6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tahun 1990-2008

| No. | Tahun | Jumlah Pengangguran<br>Terbuka | Tingkat Pengangguran Terbuka<br>(%) |
|-----|-------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1   | 1990  | 52273                          | 1,93                                |
| 2   | 1991  | 66846                          | 2,14                                |
| 3   | 1992  | 81418                          | 2,56                                |
| 4   | 1993  | 76329                          | 2,4                                 |
| 5   | 1994  | 90643                          | 5,73                                |
| 6   | 1995  | 134400                         | 7,46                                |
| 7   | 1996  | 178428                         | 4,11                                |
| 8   | 1997  | 184659                         | 4,2                                 |
| 9   | 1998  | 252291                         | 5,64                                |
| 10  | 1999  | 263889                         | 5,81                                |
| 11  | 2000  | 246437                         | 5,81                                |
| 12  | 2001  | 64725                          | 3,74                                |
| 13  | 2002  | 105987                         | 5,98                                |
| 14  | 2003  | 245605                         | 12,56                               |
| 15  | 2004  | 258224                         | 12,74                               |
| 16  | 2005  | 264307                         | 13,34                               |
| 17  | 2006  | 243525                         | 11,87                               |
| 18  | 2007  | 217305                         | 10,31                               |
| 19  | 2008  | 171134                         | 8,04                                |

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

## Lampiran 7. Hasil Regresi Linear Berganda

### Hasil Regresi Linear Berganda

Dependent Variabel: LnPDRB

| Variabel           | Coefficient | Std.Error          | t-statistic | Sig     |
|--------------------|-------------|--------------------|-------------|---------|
| C                  | 9.844       | 0.362              | 27.224      | 0.000   |
| LnInvestasi        | 0.451       | 0.048              | 9.42        | 0.000   |
| LnAPBD             | 0.108       | 0.017              | 6.343       | 0.000   |
| LnPengangguran     | 0.082       | 0.028              | 2.941       | 0.010   |
| R-Squared          | 0.963       | mean dependent var |             | 16.9419 |
| Adjusted R-Squared | 0.955       | S.D dependent var  |             | 0.25051 |
| S.E of Estimate    | 0.053       | F statistic        |             | 128.616 |
| Sum squared resid  | 0.042       | Sig (F-statistic)  |             | 0.000   |
| Durbin-Watson Stat | 1.26        |                    |             |         |

Sumber: data diolah



## Lampiran 8. Hasil SPSS untuk Uji Regresi Linear Berganda

**Variables Entered/Removed<sup>b</sup>**

| Model | Variables Entered                                | Variables Removed | Method |
|-------|--------------------------------------------------|-------------------|--------|
| 1     | LnPengangguran, LnAPBD, LnInvestasi <sup>a</sup> |                   | Enter  |

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: LnPDRB

**Coefficients<sup>a</sup>**

| Model |                | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t      | Sig. | Collinearity Statistics |       |
|-------|----------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|-------------------------|-------|
|       |                | B                           | Std. Error | Beta                      |        |      | Tolerance               | VIF   |
| 1     | (Constant)     | 9.844                       | .362       |                           | 27.224 | .000 |                         |       |
|       | LnInvestasi    | .451                        | .048       | .593                      | 9.420  | .000 | .630                    | 1.589 |
|       | LnAPBD         | .108                        | .017       | .387                      | 6.343  | .000 | .670                    | 1.493 |
|       | LnPengangguran | .082                        | .028       | .187                      | 2.941  | .010 | .620                    | 1.614 |

a. Dependent Variable: LnPDRB

**Model Summary<sup>b</sup>**

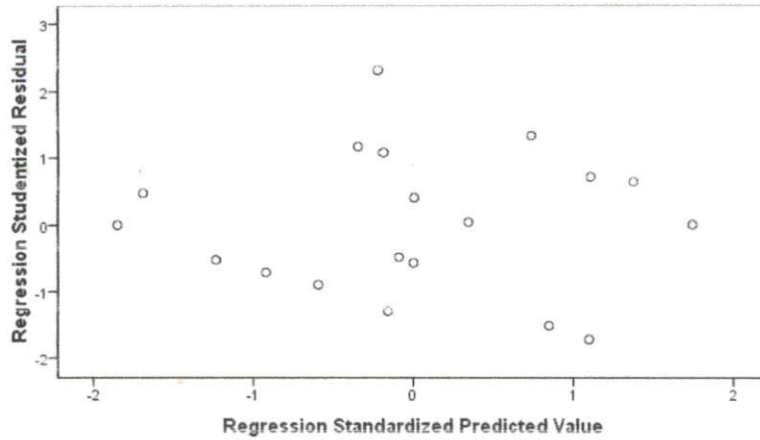
| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1     | .981 <sup>a</sup> | .963     | .955              | .05309                     | 1.260         |

a. Predictors: (Constant), LnPengangguran, LnAPBD, LnInvestasi

b. Dependent Variable: LnPDRB

# Scatterplot

Dependent Variable: LnPDRB



## ANOVA<sup>b</sup>

| Model |            | Sum of Squares | df | Mean Square | F       | Sig.              |
|-------|------------|----------------|----|-------------|---------|-------------------|
| 1     | Regression | 1.087          | 3  | .362        | 128.616 | .000 <sup>a</sup> |
|       | Residual   | .042           | 15 | .003        |         |                   |
|       | Total      | 1.130          | 18 |             |         |                   |

a. Predictors: (Constant), LnPengangguran, LnAPBD, LnInvestasi

b. Dependent Variable: LnPDRB